

**PERAN UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) PROGRAM
NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM)
MANDIRI PEDESAAN DALAM PENINGKATAN
EKONOMI DI KECAMATAN TOMPOBULU
KABUPATEN GOWA
(Ditinjau Dalam Perspektif Islam)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar
Sarjana Ekonomi (SE) Jurusan Ekonomi Islam
pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Alauddin Makassar

Oleh:

SITI NURHALIZAH
NIM : 90100115084

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Nurhalizah
Nim : 90100115084
Tempat/Tgl Lahir : Garing, 17 Oktober 1997
Jurusan : Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Alamat : Jl. Masjid Nurul Qamar III, Paccinongan, Gowa.
Judul : Peran Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional
Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan dalam
Peningkatan Ekonomi di Kecamatan Tompobulu (Ditinjau
dalam Perspektif Islam).

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Gowa, November 2019

Penyusun,



Siti Nurhalizah
90100115084



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar ■ (0411) 864924, Fax. 864923
Kampus II : Jl. H.M. Yasin Limpo Romangpolong – Gowa . ■ 424835, Fax424836

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul **"Peran Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan dalam Peningkatan Ekonomi di Kecamatan Toppobulu Kabupaten Gowa (Ditinjau dalam Perspektif Islam)"** yang disusun oleh **Siti Nurhalizah, NIM: 90100115084**, Mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 14 November 2019, bertepatan dengan 17 Rabi'ul Awal 1441 H, dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Islam.

Samata-Gowa, November 2019

DEWAN PENGUJI

Ketua : Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.
Sekertaris : Dr. Hj. Rahmawati Muin, S.Ag., M.Ag.
Munaqisy I : Dr. Amiruddin K, M.El
Munaqisy II : Muh. Akil Rahman, SE., ME.
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag
Pembimbing II : Dra. Hj. Nuraeni Gani, M.M.

Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UN Alauddin Makassar

Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.
NIP. 19661130 19930 1 003

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Tak henti-hentinya penulis panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT. karena atas berkat tahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis diberi limpahan perlindungan, kesehatan, dan pahala yang berlipat ganda sehingga penulis dapat menyusun skripsi yang berjudul **“Peran Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan dalam Peningkatan Ekonomi di Kecamatan Tompobulu (Ditinjau dalam Perspektif Islam)”**. Salawat dan salam atas baginda Rasulullah SAW. sang revosioner sejati, sang pemimpin yang selaamanya akan menjadi teladan umat manusia.

Penulis sangat menyadari bahwa keberhasilan dalam perkuliahan dan juga dalam penyelesaian skripsi ini, selain karena ketekunan penulis dan juga atas bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis patut menghanturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya, terutama kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda **Jabbar** dan Ibunda **Syamsiah**, yang telah berkorban dengan kesabaran dan keikhlasan mencurahkan perhatian, membimbing dan mendidik serta memberikan nasihat dan doa restu kepada penulis sejak kecil hingga menjadi manusia yang dewasa. Tak lupa pula terima kasih saya ucapkan kepada adik tercinta **Andhika Arfiansyah** yang telah memberi dukungan, kasih sayang dan semangat hingga tercapainya keberhasilan ini.

Secara khusus penulis ingin penyampaian terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak **Prof. Drs. Hamdan Juhannis, M.A., Ph.D.** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta Wakil Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
2. Bapak **Prof. H. Abustani Ilyas, M.Ag.** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
3. Bapak **Ahmad Efendi, SE., M.M.** selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan Bapak **Akramunnas, SE., M.M** selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
4. Bapak **Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag.** selaku Pembimbing I, yang telah membantu dan membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini hingga akhir dan tidak menemukan kesulitan.
5. Ibu **Dra. Hj. Nuraeni Gani, M.M.** selaku Pembimbing II, yang telah dengan sabar mendidik dan memberikan arahan yang tulus dan ikhlas sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar.
6. Seluruh dosen Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar khususnya Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang telah berkenan memberi kesempatan, membina, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan sejak awal kuliah sampai dengan penyelesaian skripsi.

7. Seluruh Staf Akademik dan Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta Staf Jurusan Ekonomi Islam, terima kasih atas kesabarannya dalam memberikan pelayanan.
8. Kepada **H. Sahid Squaddan Jansquad**, terima kasih telah membantu, mendukung dan mengajarkan kebaikan kepada penulis, terima kasih pula telah menjadi rumah ternyaman bagi penulis.
9. Terima kasih kepada **UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Tompobulu** serta Masyarakat Kecamatan Tompobulu yang telah membantu dan bersedia menjadi informan bagi penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. Kepada sahabat-sahabat **Relexands, Damsquad, Girl Unit**, terima kasih selama ini telah saling mendampingi dan mendukung dalam menyelesaikan pendidikan.
11. Kepada Keluarga KKN angkatan 60, Desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang (*Posko Sultan*). **Muhammad Ashar, Jusriansyah, S.Pd., Syahrul Salahuddin, S.H., Samsinar, S.Si., Karmilasari, S.Ag., Usti Arung Sari, S. Ikom., Mutmainnah, S.H., Asmawati, S.Hum.** dan **Syaiffah Ainiyah**, terima kasih atas 45 hari yang berharga dan penuh kebahagiaan.
12. Kepada teman-teman jurusan Ekonomi Islam angkatan 2015, khususnya kelas Ekonomi Islam B, yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas kebahagiaan, keceriaan dan kebersamaannya.
13. Teman-teman diseluruh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, terima kasih atas do'a dan nasehat yang diberikan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi.

Segala usaha dan upaya telah dilakukan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin. Namun apabila terdapat kesalahan atau kekurangan

dalam skripsi ini, saran dan kritik penulis akan terima dengan baik. Semoga Allah SWT. memberikan rahmat dan karunianya kepada orang-orang yang telah mendoakan dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin
Ya Robbal ‘Alamin.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Samata-Gowa,

November 2019

Penulis,

Siti Nurhalizah

NIM: 90100115084



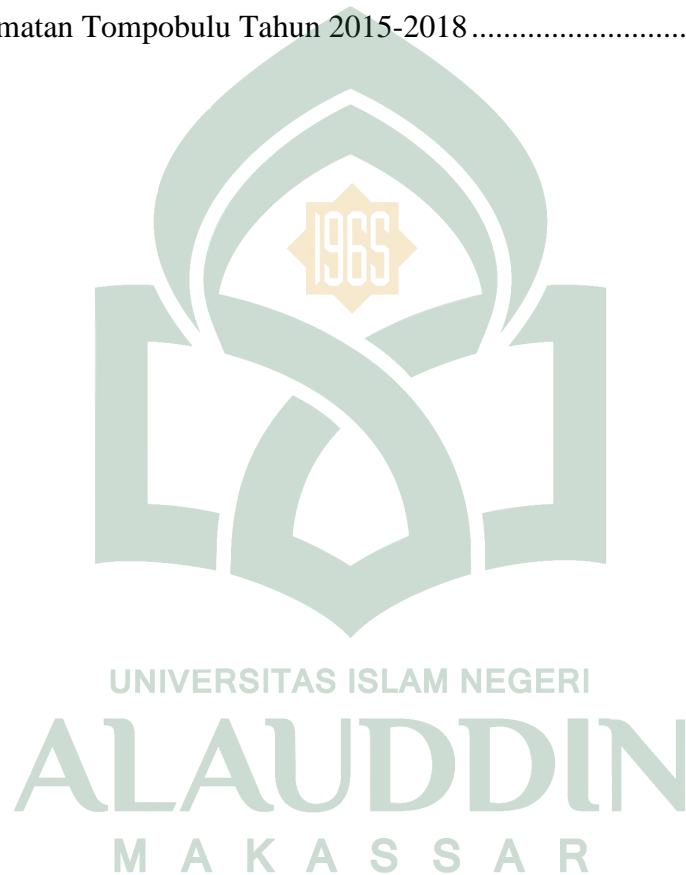
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv-vii
DAFTAR ISI.....	viii-ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
ABSTRAK	xii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1-14
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	10
D. Tinjauan Pustaka.....	10
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	13
BAB II : TINJAUAN TEORITIS.....	15-38
A. Unit Pengelola Kegiatan (UPK)	15
B. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri	17
C. PNPM Mandiri Pedesaan.....	21
D. Peningkatan Ekonomi	28
E. Ekonomi Islam.....	33
F. Kerangka Konseptual.....	37
BAB III : METODE PENELITIAN	39-44
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	39
B. Pendekatan Penelitian.....	39
C. Sumber Data	40
D. Metode Pengumpulan Data.....	41
E. Instrumen Penelitian	42
F. Analisis Data.....	42
G. Pengujian Keabsahan Data	44

BAB IV : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	45-72
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	45
B. Upaya UPK PNPM Mandiri Pedesaan dalam Peningkatan Ekonomi di Kecamatan Tompobulu	47
C. Kendala yang Dihadapi UPK PNPM Mandiri dalam Upaya Peningkatan Ekonomi di Kecamatan Tompobulu....	53
D. Faktor-faktor Pertumbuhan Ekonomi Melalui UPK PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Tompobulu	56
E. Karakteristik Pertumbuhan Ekonomi Islam MelaluiUPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Tompobulu	60
F. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Peran UPK PNPM Mandiri Pedesaan dalam Peningkatan EkonomiDi Kecamatan Tompobulu.....	64
BAB V : PENUTUP	73-75
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
C. Keterbatasan dan Hambatan dalam Penelitian.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76-76
LAMPIRAN.....	79-98
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	99

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Gambaran Umum Kecamatan Tompobulu	48
Tabel 4.2 Laporan Perguliran Dana UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Tompobulu tahun 2015-2018	58
Tabel 4.3 Peningkatan Jumlah Anggota UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Tompobulu Tahun 2015-2018	61



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Kerangka Konseptual



ABSTRAK

Nama : Siti Nurhalizah
Nim : 90100115084
Judul Skripsi : Peran Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Prograam Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan terhadap Peningkatan Ekonomi di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa (Ditinjau dalam Perspektif Islam)”.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya UPK PNPM Mandiri Pedesaan dalam peningkatan ekonomi di Kecamatan Tompobulu, mengetahui kendala-kendala yang dihadapi UPK PNPM Mandiri Pedesaan dalam upaya peningkatan ekonomi di Kecamatan Tompobulu, serta mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap peran UPK PNPM Mandiri Pedesaan terhadap peningkatan ekonomi di Kecamatan Tompobulu.

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari dan memahami secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuai dengan unit sosial, individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPK PNPM Mandiri Pedesaan berperan dalam peningkatan ekonomi di Kecamatan Tompobulu melalui bantuan dana yang diberikan kepada masyarat sebagai modal dalam membuka dan mengembangkan usaha mikro sehingga dapat meningkatkan penghasilan. Adapun kendala yang sering dihadapi oleh UPK PNPM Mandiri Kecamatan Tompobulu adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan dana dari pinjaman UPK PNPM Mandiri Pedesaan, kredit macet dan pencairan dana yang mengalami keterlambatan. Adapun tinjauan ekonomui Islam terhadap Peran UPK PNPM Mandiri Pedesaan dalam peningkatan ekonomi di Kecamatan Tompobulu dalah baik, karena membantu masyarakat dalam membuka dan mengembangkan usaha dengan memberi bantuan modal, tetapi dari segi mekanisme simpan pinjam UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Tompobulu mengandung riba.

Kata Kunci: UPK PNPM Mandiri Pedesaan, Peningkatan Ekonomi, Tinjauan Ekonomi Islam.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Krisis perekonomian nasional yang melanda Indonesia tampaknya belum teratasi secara total, meskipun berbagai metode atau formula telah dicoba untuk mengatasinya. Kenyataan ini telah menyadarkan banyak pihak bahwa ada kekeliruan kebijakan ekonomi yang diterapkan selama ini. Kebanyakan pengamat ekonomi telah sepakat bahwa kesalahan tersebut dimungkinkan oleh strategi pembangunan yang diterapkan pemerintah selama ini terlalu mengacu pada pemikiran kaum kapitalisme liberal dengan azas moral ekonominya “*free fight liberalism*”, dalam rangka penerapan paradigma pembangunan ekonomi yang mendewakan pertumbuhan “*trickling-down effect*”.¹

Pertumbuhan ekonomi dalam tatanan kebijakan pada umumnya diartikan sebagai pencapaian pertumbuhan yang tinggi dan pemerataan. Pertumbuhan ekonomi saja kemungkinan hanya akan menguntungkan sebagian kecil masyarakat dan meninggalkan sebagian besar masyarakat miskin. Sedangkan mengutamakan pemerataan saja tanpa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau hanya berputar pada pemerataan kemiskinan. Oleh karena itu kebijakan ekonomi suatu negara harus disusun untuk lebih *pro-*

¹Marsuki, *Analisis Perekonomian Nasional dan Internasional*, Ed. 2, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), h. 73.

growth (memacu pertumbuhan ekonomi), *pro-job* (memperluas lapangan kerja), dan *pro-poor* (mengurangi kemiskinan).²

Kemiskinan sesungguhnya merupakan suatu kondisi yang ditolak oleh manusia, tetapi kenyataannya sulit untuk dihindari. Berdasarkan pengalaman yang terjadi, menunjukkan bahwa selama ini Indonesia belum terbebas dari kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah gradual yang melanda setiap bangsa, bahkan bangsa di negara maju sekalipun masih memiliki kantong-kantong kemiskinan. Kemiskinan juga menjadi masalah besar khususnya bagi negara-negara yang sedang berkembang. Fakta sejarah menunjukkan bahwa pembangunan bangsa Indonesia dengan upaya mengatasi kemiskinan.³

Presentase penduduk miskin yang tinggal di daerah pedesaan ternyata lebih besar dari yang tinggal di daerah perkotaan. Kondisi ini disebabkan karena kegiatan ekonomi daerah pedesaan umumnya didominasi oleh kegiatan pertanian, dalam arti luas meliputi tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Kegiatan ekonomi tersebut umumnya mempunyai tingkat produktivitas yang lebih rendah dari kegiatan ekonomi daerah perkotaan yang lebih banyak didominasi oleh kegiatan industri, perdagangan dan jasa. Akibatnya nilai pendapatan perkapita rata-rata yang diterima oleh masyarakat pedesaan cenderung menjadi lebih rendah dari yang diterima oleh masyarakat perkotaan.⁴

²Indra Maipita, *Mengukur Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan*, Ed. 1, (Yogyakarta: UUP STIM YKPN, 2014), h. 78.

³Ambar Teguh Sulistiyanti, *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gava Media, 2004), h. 4.

⁴Sjafrizal, *"Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi"*, (Cet. 2, Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 175.

Permasalahan kemiskinan ini telah menggugah pemerintah dan berbagai lembaga internasional seperti bank dunia untuk berperan aktif mengentaskan kemiskinan melalui berbagai program. Beberapa program cenderung persial atau berhubungan dan tidak berkelanjutan. Untuk itu, diperlukan perubahan yang bersifat sistematis atau lebih teratur dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

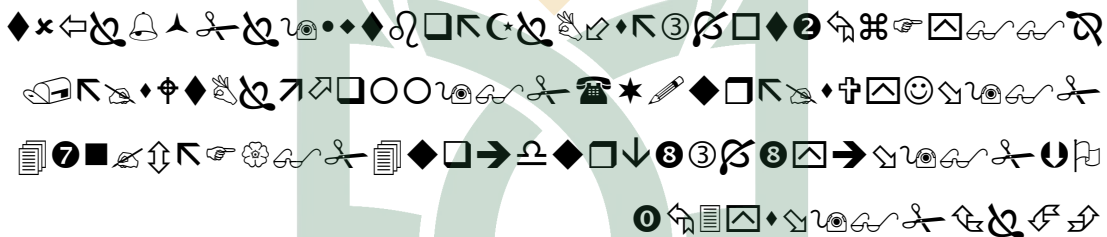
Pemberdayaan masyarakat merupakan metode yang cukup efektif untuk membantu mengatasi masalah kemiskinan atau paling tidak mencegah munculnya masalah-masalah turunan dari kemiskinan seperti busung lapar, kurang gizi, anak putus sekolah, bayi terlantar, anak jalanan, kondisi lingkungan pemukiman yang buruk, kriminalitas dan prostitusi.⁵ Masalahnya, dibutuhkan komitmen jangka panjang untuk memfasilitasi kesinambungan dari upaya pengembangan masyarakat yang berjalan, agar target jangka panjang dalam mengurangi kemiskinan dapat menjadi kenyataan.

Sebagai bentuk upaya pemerintah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat pedesaan, pemerintah kemudian membentuk suatu program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air. Pada tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan adalah keberlanjutan dari Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang telah ada sejak tahun 1999. PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk

⁵Abu Huraerah, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakatan*, (Bandung: Humaniora, 2011). h. 187.

mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah pedesaan. Latar belakang adanya PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang mulai ditetapkan pada tahun 1998. Jadi Program Pengembangan Kecamatan (PPK) ini berganti Program menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri pada tahun 2008. PNPM Mandiri sendiri dikukuhkan secara resmi oleh Presiden RI pada 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah.⁶

Upaya pemerintah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dan pemerataan kesejahteraan masyarakat sejalan dengan perintah Allah dalam QS. An-Nahl/16 ayat 90, tentang anjuran berlaku adil dalam berbuat kebaikan.



Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”⁷

Dalam ayat di atas, terdapat anjuran untuk berlaku adil kepada semua orang tanpa condong kepada sebagiannya kecuali dengan alasan yang mewajibkan itu.

⁶Apriliana, “Evaluasi Program nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan dan Perekonomian Masyarakat (Studi Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu)” Skripsi, (Bandar Lampung: Fak Ilmu Sosial dan Politik, 2017).

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Lembaga Percetakan Al-Qur'an Raja Fahd), h. 415.

Allah juga menganjurkan untuk membantu dalam memenuhi kebutuhan para kerabat.⁸ Dengan demikian, pemerintah berkewajiban untuk berlaku adil bagi masyarakat dan mengupayakan untuk pemerataan kesejahteraan.

Dalam pelaksanaannya, program ini memusatkan kegiatan bagi masyarakat Indonesia paling miskin di wilayah perdesaan. Program ini menyediakan fasilitas pemberdayaan masyarakat/ kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan, serta dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM). Besaran dana BLM yang dialokasikan sebesar Rp750 juta sampai Rp3 miliar per kecamatan, tergantung jumlah penduduk.

Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, seluruh anggota masyarakat diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawah binaan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Kementerian Dalam Negeri. Program ini didukung dengan pembiayaan yang berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana pinjaman atau hibah luar negeri dari sejumlah lembaga pemberi bantuan dibawah koordinasi Bank Dunia.⁹

PNPM Mandiri Pedesaan sebagai program pemberdayaan masyarakat yang berusaha memberikan pelayanan dan kontribusi optimal dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin pedesaan. Selain itu diharapkan juga adanya

⁸Tafsir Al-Mukhtashar/Markaz Tafsir Riyad di Bawah Pengawasan Syaikh Dr. Shalib Bin Abdullah Bin Humaid (Imam Masjidil Haram).

⁹Wikipedia, “*PNPM Mandiri Pedesaan*”, diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/PNPM_Mandiri_Pedesaan, pada tanggal 24 Juli 2018.

partisipasi dari pihak Rumah Tangga Miskin (RTM) dan perempuan memberikan sumbangsih pemikiran dalam pelaksanaan program ini, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian. Kesempatan kerja bagi RTM akan dimaksimalkan sesuai dengan jenis pekerjaan yang akan dilakukan. Diharapkan juga adanya kerjasama yang positif antar pelaku PNPM Mandiri Pedesaan baik dari tingkat desa sampai tingkat pusat dan senantiasa terbangun suatu komunikasi yang ideal antar pelaku PNPM Mandiri Pedesaan yang dapat memberikan kelancaran dan kesuksesan program ini sehingga dapat memberikan hasil yang terbaik.¹⁰

Ruang lingkup kegiatan PNPM Mandiri pada dasarnya terbuka bagi semua kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diusulkan dan disepakati masyarakat, meliputi: penyediaan dan perbaikan sarana/prasarana lingkungan pemukiman, sosial dan ekonomi secara padat karya, penyediaan sumber daya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin, kegiatan terkait peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintah lokal melalui penyadaran kritis, pelatihan keterampilan usaha, manajemen organisasi dan keuangan, serta penerapan tata pemerintahan yang baik.¹¹

PNPM Mandiri mempunyai batasan waktu pelaksanaan yaitu pada tahun 2008-2014, dan kini Program PNPM Mandiri telah berakhir ditandai dengan diberlakukannya UU No. 6 tahun 2014. Aset PNPM Mandiri Yang berupa aset fisik, bangunan dan perlengkapan kerja maupun aset ekonomi berupa dana perguliran harus

¹⁰Laporan Fasilitator Kecamatan, PNPM Mandiri Pedesaan.

¹¹Dian Novitasari, "Analisis Program PNPM Mandiri Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Miskin di Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali Tahun 2009" Skripsi, (Surakarta: Fak Ekonomi, 2011).

tetap lestari dan berkelanjutan. Untuk mengelola dana tersebut dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan azas dan prinsip PNPM, maka diperlukan organisasi yang dapat menjaga pelaksanaan program yang berkesinambungan serta untuk menjamin keamanan, akuntabilitas penyaluran dana PNPM Mandiri Pedesaan, oleh karena itu dibentuk Unit Pengelola Kegiatan (UPK) sebagaimana telah diatur dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) yang berkedudukan di kecamatan.¹²

Unit Pengelola Kegiatan (UPK) adalah unit yang mengelola operasional kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan di kecamatan dan membantu BKAD mengoordinasikan pertemuan-pertemuan di kecamatan. Secara umum UPK PNPM Mandiri mempunyai peran yang sangat penting bagi masyarakat untuk membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Tompobulu sejak tahun 2014 telah mengelola dana sebesar Rp. 1.019.650.000. dan hingga tahun 2018 berhasil dikembangkan menjadi Rp. 2.575.000.000.¹³

Dalam upaya pemberdayaan/ peningkatan ekonomi masyarakat khususnya masyarakat miskin, UPK Kecamatan Tompobulu mengelola dana Simpan Pinjam dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan yang berbasis kelompok dari 8 desa/kelurahan yang berpartisipasi dalam PNPM Mandiri Pedesaan dengan pengelolaan Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Adapun keadaan kegiatan kelompok adalah sebagai berikut:

¹²Profil Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa.

¹³Petunjuk Operasional PNPM Mandiri Pedesaan, Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa.

1. Jumlah desa layanan : 8 Desa/Kelurahan
2. Jumlah kelompok awal : 69 Kelompok
3. Jumlah kelompok setelah perguliran : 110 Kelompok
4. Jumlah anggota pemanfaat awal : 261 Orang
5. Jumlah anggota pemanfaat sampai sekarang : 1118 Orang

Kecamatan Tompobulu merupakan salah satu kecamatan yang berada di dataran tinggi Kabupaten Gowa, terletak di bagian timur Kabupaten Jenepoto dan di bagian selatan Kabupaten Bantaeng. Kecamatan ini dibentuk berdasarkan Peraturan Kabupaten Gowa Nomor 7 tahun 2007 Tentang Pembentukan Kecamatan di Kabupaten Gowa. Kecamatan ini dibagi dalam enam desa dan dua kelurahan sebagai pembagian wilayah administratifnya. Kecamatan Tompobulu termasuk dalam wilayah administratif kabupaten Gowa, ibukota kecamatan terletak di Kelurahan Malakaji dengan jarak dari ibukota kabupaten ke ibukota kecamatan ± 90 km.

Kecamatan Tompobulu merupakan daerah dataran tinggi (pegunungan) dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 8 desa/kelurahan. Penduduk di kecamatan ini umumnya berprofesi sebagai petani, peternak, PNS, sebagian warga bergerak pada usaha sektor perdagangan. Kondisi sosial budaya masih sangat kental dan dijunjung tinggi oleh masyarakat. Peraturan yang bersumber dari kesepakatan pemuka masyarakat sangat menonjol dan dominan dalam mengerjakan dan menyelesaikan suatu masalah.¹⁴

Masyarakat Kecamatan Tompobulu secara keseluruhan beragama Islam, dan sebagian masyarakatnya berada dalam ekonomi golongan menengah ke bawah.

¹⁴Profil Kecamatan tompobulu Tahun 2017.

Sementaara Islam menganjurkan kepada kita bahwasanya umat Islam itu sendiri harus kuat dalam perekonomiannya supaya mereka khusu' dalam menjalankan ibadah kepada Allah SWT. karena Nabi kita sendiri pernah mengatakan bahwa kemiskinan akan membawa umatnya kepada kekufuran, dan juga Nabi Muhammad SAW. menganjurkan umatnya untuk kuat dalam perekonomiannya, dengan maksud supaya lebih banyak membantu dan khusu' dalam beribadah kepada sang penciptanya, yaitu Allah SWT.

Hal inilah yang menjadi alasan penulis untuk meneliti kasus ini lebih dalam mengingat PNPM Mandiri Pedesaan merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat yang masih aktif, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk di kecamatan Tompobulu, sehingga mengangkat judul **“Peran Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan dalam Peningkatan Ekonomi Di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa (Ditinjau dalam Perspektif Islam)”**, agar dapat dikaji lebih mendalam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya UPK PNPM Mandiri Pedesaan dalam peningkatan ekonomi di Kecamatan Tompobulu?
2. Apa saja kendala yang dihadapi UPK PNPM Mandiri Pedesaan dalam upaya peningkatan ekonomi di Kecamatan Tompobulu?
3. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap upaya UPK PNPM Mandiri Pedesaan dalam peningkatan ekonomi di Kecamatan Tompobulu?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Penelitian akan difokuskan pada peran UPK PNPM Mandiri Pedesaan dalam peningkatan ekonomi masyarakat menurut perspektif Ekonomi Islam di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa.

2. Deskripsi Fokus

Untuk menghindari kekeliruan pandangan terhadap pengertian sebenarnya dari judul skripsi ini, maka penulis menjelaskan beberapa kata dalam judul ini.

PNPM Mandiri Pedesaan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong penurunan angka kemiskinan dan pengangguran di wilayah pedesaan. PNPM Mandiri difokuskan pada program penanggulangan kemiskinan yang berbasis partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.¹⁵

Pada penelitian ini difokuskan pada UPK PNPM Mandiri kecamatan Tompobulu, dikarenakan UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Tompobulu merupakan salah satu UPK PNPM Mandiri Pedesaan di Kabupaten Gowa yang telah bergabung pada tahun 2008 dan masih aktif mengelolah aset dan dananya sampai sekarang.

Ekonomi masyarakat adalah cara atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam mengatur perekonomian rumah tangga untuk menjadi lebih baik dengan tujuan dapat memenuhi kebutuhan hidup.

D. Tinjauan Pustaka

¹⁵Departemen Dalam negeri Tahun 2008.

Dalam penelitian ini, selain membahas teori-teori yang relevan dengan penelitian ini, dilakukan juga pengkajian terhadap hasil-hasil penelitian yang sudah pernah dilakukan para peneliti. Pengkajian atas hasil-hasil penelitian terdahulu akan sangat membantu peneliti-peneliti lainnya dalam menelaah masalah yang akan dibahas. Selain itu dengan mempelajari hasil-hasil penelitian terdahulu akan memberikan pemahaman secara komprehensif mengenai posisi peneliti. Karena itu, ada beberapa hasil penelitian terdahulu.

Ari Pratama pada tahun 2018 melakukan penelitian menggunakan metode penelitian eksplanasi dengan pendekatan kuantitatif, dengan judul “Analisis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui UPK PNPM Mandiri dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar (Studi Kasus: UPK PNPM Mandiri Kecamatan Baitussalam)”. Berdasarkan penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemberdayaan ekonomi yang dilakukan UPK PMPN Mandiri efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan, itu dibuktikan dengan adanya pengurangan angka kemiskinan (*Poverty Reduction*) peserta PNPM sebesar 75%. Jumlah penduduk miskin sebelum program (2009) adalah 4.55% dan turun menjadi 1.14% di tahun 2016.¹⁶

Nur Inas Purnamasari pada tahun 2015 melakukan penelitian menggunakan metode kuantitatif asosiatif dengan judul “Pengaruh Program Pemerintah PNPM Mandiri (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri) Terhadap Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Di Desa Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur”. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara program pemerintah PNPM Mandiri terhadap Peningkatan Taraf Hidup

¹⁶Ari Pratama, “Analisis Pemberdayaan Ekonomu Masyarakat Melalui UPK PNPM Mandiri dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar (Studi Kasus: UPK PNPM Mandiri Kecamatan Baitussalam)”, Skripsi, (Banda Aceh: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam, 2018).

Masyarakat di Desa Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur yang memberikan memberikan kontribusi sebesar 42,25%.¹⁷

Jima pada tahun 2013 melakukan penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tipe penelitian (*eksplanatory*) dengan judul “Analisis Program PNPM Mandiri Pedesaan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat”. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan analisis AHP pada peran manajemen sumber daya manusia program PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Kerakitan, Bayat, Klaten diketahui bahwa sumber daya manusia yang paling kuat adalah perencanaan (*planning*) dengan hasil eigen veckot sebesar 0.444 artinya sebesar 33%.¹⁸

Febrilia Ika Aresta pada tahun 2013 melakukan penelitian dengan judul “Peranan Bantuan Modal PNPB Mandiri Pedesaan (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan) Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Desa Banyuurip, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purwarejo”. Hasil penelitian meunjukkan bahwa dengan diterimanya hipotesis dalam penelitian ini berarti bahwa adapengaruh positif dan signifikan bantuan modal PNPB Mandiri Perdesaan terhadap peningkatanpendapatan anggota kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Desa Banyu Urip.¹⁹

¹⁷Nur Inas Purnamasari, “Pengaruh Program Pemerintah PNPM Mandiri (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri) Terhadap Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Di Desa Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur”, *EJournal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3, No. 1, 2015, h. 27. [http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/sitewp-content/uploads/201502/Jurnal%20Nur%20Inas%20Purnamasari%20\(02-04-15-07-04-41\).pdf](http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/sitewp-content/uploads/201502/Jurnal%20Nur%20Inas%20Purnamasari%20(02-04-15-07-04-41).pdf). (Diakses 05 Desember 2018).

¹⁸Jima, “Analisis Program PNPM Mandiri Pedesaan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat”, *DAYA SAING Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya*, Vol. 14, No. 2, (Desember 2013), h. 103. <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/1161752725.pdf;sequence=1> 05-12. (Diakses pada 05 Desember 2018).

¹⁹Febrilia Ika Aresta, “Peranan Bantuan Modal PNPB Mandiri Pedesaan (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan) Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Desa

Muhammad Zakir pada tahun 2011 melakukan penelitian dengan judul “Peran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kecamatan Bakinang Seberang Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam”. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan dari beberapa program yang ada di PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Bangkinang Seberang yang mempunyai peranan langsung terhadap peningkatan UMKM adalah Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Karena dengan adanya pinjaman ini, masyarakat khususnya para pelaku UMKM dapat mengembangkan usaha yang telah dijalankan dengan adanya tambahan modal. Adapun tinjauan ekonomi Islamnya ialah PNPM Mandiri Pedesaan dalam upaya peningkatan UMKM di Kecamatan Bangkinang Seberang khususnya simpan pinjam perempuan ini adalah baik, karena didalamnya terdapat unsur tolong-menolong antar pihak pemberi pinjaman kepada pihak yang meminjam dana (masyarakat). Dan masyarakat yang meminjam tidak merasa keberatan dengan balas jasa yang diberikan²⁰

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui upaya UPK PNPM Mandiri Pedesaan dalam peningkatan ekonomi di Kecamatan Tompobulu.

Banyuurip, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purwarejo”, Skripsi, (Yogyakarta: Fak. Ekonomi, 2013).

²⁰ Muhammad Zakir, “Peran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kecamatan Bakinang Seberang Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam”, Skripsi, (Riau: Fak. Syari’ah dan Hukum, 2011).

- b. Mengetahui kendala yang dihadapi UPK PNPM Mandiri Pedesaan dalam upaya peningkatan ekonomi di Kecamatan Tompobulu.
- c. Mengetahui tinjauan ekonomi Islam terhadap upaya UPK PNPM Mandiri Pedesaan dalam peningkatan ekonomi di Kecamatan Tompobulu.

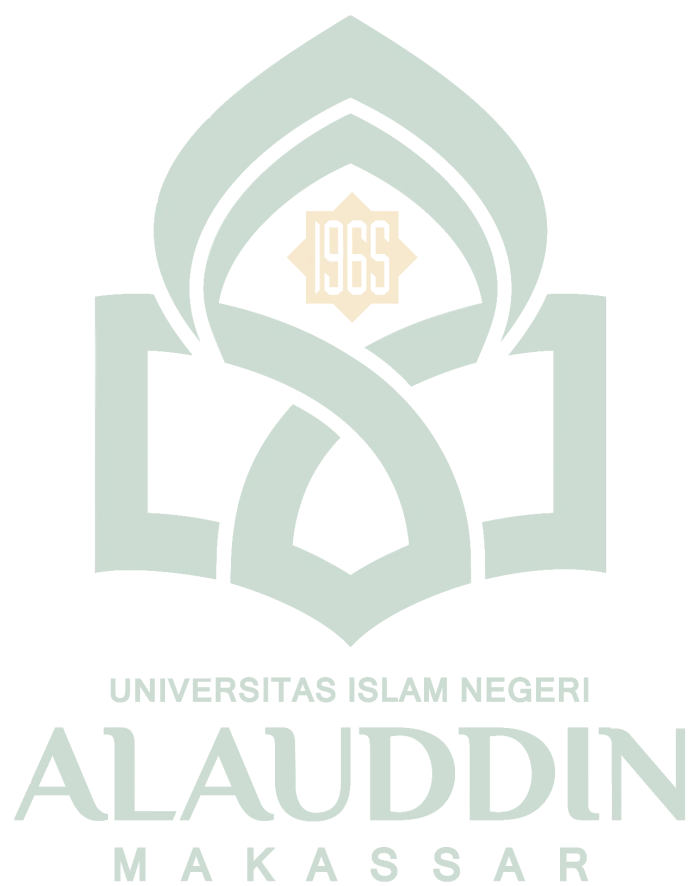
2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Ilmiah

- 1) Sebagai wahana menambah pengetahuan mengenai UPK PNPM Mandiri Pedesaan.
- 2) Khazanah bacaan dan bahan kajian bagi penulis selanjutnya.
- 3) Diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi.

b. Kegunaan Praktisi

- 1) Dapat dijadikan solusi untuk membantu UPK PNPM Mandiri Pedesaan dalam peningkatan ekonomi masyarakat di Kecamatan Tompobulu.
- 2) Dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang peran UPK PNPM Mandiri pedesaan dalam peningkatan ekonomi masyarakat di Kecamatan Tompobulu.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. *Unit Pengelola Kegiatan (UPK)*

1. Pengertian UPK

Unit pengelola kegiatan adalah unit yang mengelola operasional kegiatan PNPM mandiri pedesaan di Kecamatan dan membantu Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) mengoordinasi pertemuan-pertemuan di kecamatan.

2. Tugas dan Tanggung Jawab UPK

Secara umum UPK mempunyai tugas dan tanggung jawab yang besar dalam program PNPM Mandiri, di antaranya sebagai berikut:

- a. Bertanggung jawab terhadap seluruh pengelolaan dana PNPM Mandiri.
- b. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan administrasi dan pelaporan seluruh transaksi kegiatan PNPM.
- c. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen PNPM yang bersifat keuangan.
- d. Bertanggung jawab terhadap dana bergulir.
- e. Melakukan pembinaan terhadap kelompok peminjam.
- f. Melakukan sosialisasi dan penegakan prinsip-prinsip PNPM.
- g. Membuat perencanaan keuangan dan rencana kerja sesuai dengan kepentingan program yang disampaikan pada Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD)/Musyawarah Antar Desa (MAD)
- h. Melakukan pertanggung jawaban keuangan dan realisasi rencana kerja pada BKAD/MAD sesuai dengan kebutuhan. Bahan laporan pertanggung jawaban

disampaikan kepada seluruh desa yang terkait langsung satu minggu sebelum pelaksanaan.,.

- i. meelakukan evaluasi dan pemeriksaan langsung Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD).
- j. Melakukan bimbingan teknis.

3. Penataan Organisasi UPK

Penataan UPK di lokasi kecamatan PNPM Mandiri Pedesaan dilakukan bertujuan:

- a. Memenuhi tuntutan evaluasi kinerja program (PNPM Mandiri Pedesaan) sehingga UPK dapat menjaga akuntabilitas pengelola kegiatan secara bertahap menciptakan keberlanjutan dan kemandirian organisasi.
- b. Melakukan misi perluasan usaha simpan pinjam kelompok di desa dan antar desa sehingga potensi-potensi lokal dapat dikembangkan melalui penyediaan modal pinjaman yang terjangkau. Untuk itu seluruh fungsi (tugas dan peran, kewajiban dan tanggung jawab serta hak-hak) dalam organisasi UPK harus dijabarkan dalam Standar Operasional dan Prosedur (SOP) secara jelas dan dapat dievaluasi secara periodik dari waktu-kewaktu.

4. Kebijakan Penataan UPK

Dalam rangka penataan kelembagaan dan pengembangan UPK kedepan, maka kebijakan yang diambil pemerintah adalah status kepemilikan aset yang dikelola UPK adalah milik masyarakat. Sumber aset ini pada awalnya berasal dari dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Pedesaan. BLM pada dasarnya adalah bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat.

5. Kegiatan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh unit pengelola PNPM Mandiri yaitu sebagai berikut:

- a. Kegiatan lingkungan (perbaikan jalan).
- b. Kegiatan sosial simpan pinjam perempuan (SPP), Pendidikan dan kesehatan.
- c. Kegiatan ekonomi (membantu menciptakan usaha).

B. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri

1. Pengertian PNPM Mandiri

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri merupakan program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.

PNPM Mandiri telah dilaksanakan sejak tahun 2007, dimulai dengan Program Pengembangan Kecamatan (PKK) dan Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP). Keberhasilan PKK dan P2KP menjadi model pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di pedesaan dan perkotaan dilokasi PNPM Mandiri. PNPM Mandiri dimaksudkan untuk menjadi payung program penanggulangan kemiskinan dengan menggunakan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat (CDD).

PNPM Mandiri resmi di luncurkan oleh Presiden RI, Susilo Bambang Yudhono di Palu, Sulawesi Tengah pada 30 April 2007 yang dilaksanakan hingga tahun 2014 dan sejalan dengan target pencapaian MDGs (Millennium Development

Goals). Diharapkan dalam rentang waktu 2007-2014, kemandirian dan keberdayaan masyarakat telah terbentuk sehingga keberlanjutan program dapat terwujud.²¹

2. Jenis-Jenis PNPM Mandiri

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang dicanangkan oleh pemerintah ada 3 jenis, yaitu:²²

a. PNPM Mandiri Pedesaan

PNPM Mandiri Pedesaan merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah pedesaan.

b. PNPM Mandiri Perkotaan

Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) mulai ditetapkan pada tahun 1999 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerja Umum Nomor 33/KPTS/1999 tentang susunan organisasi dan tata hubungan kerja proyek manajemen unit P2KP yang dijalankan oleh Ditjen Perumahan dan Pemukiman. Program ini kemudian berganti nama menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan pada tahun 2008.

c. PNPM Mandiri Wilayah Khusus dan Desa Tertinggal

PNPM Mandiri Wilayah Khusus dan Daerah Tertinggal bertujuan untuk mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sosial ekonomi daerah khusus dan tertinggal dengan mengembangkan kapasitas PemDa, masyarakat dan sektor swasta dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya.

²¹PNPM Mandiri, “Paket Informasi 2012-1013”, h. 4.

²²Departemen Dalam Negeri Tahun 2008.

3. Jenis Kegiatan PNPM Mandiri

Terdapat beberapa jenis kegiatan yang ada di dalam pelaksanaan program PNPM Mandiri, kegiatan tersebut meliputi:²³

- a. Kegiatan pembangunan atau perbaikan sarana dan prasarana dasar yang dapat memberikan manfaat langsung secara ekonomi bagi rumah tangga miskin.
- b. Kegiatan peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan termasuk kegiatan pelatihan pengembangan keterampilan masyarakat (pendidikan non formal).
- c. Kegiatan peningkatan kapasitas keterampilan kelompok usaha ekonomi terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produk berbasis sumber daya lokal.
- d. penambahan pemodalan Simpan Pinjam untuk kelompok Perempuan (SPP).

4. Jenis Kegiatan yang Dilarang

Jenis kegiatan yang tidak boleh didanai melalui PNPM Mandiri adalah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan militer atau angkatan bersenjata, pembiayaan kegiatan politik praktis/ partai politik.
- b. Pembangunan/rehabilitasi bangunan kantor pemerintah dan tempat ibadah.
- c. pemeliharaan chainsaw, senjata, bahan peledak, asbestos dan bahan-bahan lain yang merusak lingkungan (pestisida, herbisida, obat-obat terlarang, dan lain-lain).
- d. Pembelian kapal ikan yang berbobot di atas 10 ton dan perlengkapannya.
- e. Pembiayaan gaji pegawai negeri.
- f. Pembiayaan kegiatan yang mempekerjakan anak-anak di bawah usia kerja.

²³Departemen Dalam Negeri Tahun 2008.

- g. Kegiatan yang berkaitan dengan produksi, penyimpanan, atau penjualan barang-barang yang mengandung tembakau.
- h. Kegiatan apapun yang dilakukan pada lokasi yang telah ditetapkan sebagai cagar alam, kecuali ada ijin tertulis dari instansi yang mengelola lokasi tersebut.
- i. Kegiatan pengelolaan tambang atau pengambilan dan penggunaan terumbu karang.
- j. Kegiatan yang berhubungan pengelolaan sumber daya air dari sungai yang mengalir dari atau menuju negara lain, kegiatan yang berkaitan dengan pemindahan jalur sungai.
- k. Kegiatan yang berkaitan dengan reklamasi daratan yang luas lebih dari 50 Hektar (Ha).
- l. Pembangunan jaringan irigasi baru yang luasnya lebih dari 50 Ha.
- m. Kegiatan pembangunan bendungan atau penampungan air dengan kapasitas besar, lebih dari 10.000 meter kubik.

5. Peraturan Menteri Keuangan tentang PNPM Mandiri

Dasar peraturan perundangan sistem keuangan negara tentang PNPM Mandiri adalah:²⁴

- a. Undang-undang Nomor. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4455);

²⁴Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.

- c. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1138);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4597);
- f. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Barang/jasa Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor.005/MPPN/06/2006 tentang Tata cara Perencanaan dan Pengajuan Usulan serta Penilaian Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2006 tentang Tata cara Pemberian Hibah Kepada Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

C. PNPM Mandiri Pedesaan

1. Pengertian PNPM Mandiri Pedesaan

PNPM Mandiri Pedesaan merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya

mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja wilayah pedesaan.

Mulai tahun 2007 pemerintah Indonesia mencanangkan program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Pedesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. PNPM Mandiri Pedesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan di wilayah pedesaan²⁵.

Adapun peraturan tentang pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan ini adalah Surat Menteri dalam Negeri No. 414.2/2634/PMD tanggal 29 Desember 2008 perihal petunjuk pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan.

2. Visi dan Misi PNPM Mandiri Pedesaan

Adapun visi dan misi PNPM Mandiri Pedesaan adalah sebagai berikut:²⁶

a. Visi

Visi PNPM Mandiri Pedesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin pedesaan. Kesejahteraan di sini berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan.

b. Misi

Misi dari PNPM Mandiri Pedesaan adalah:

²⁵Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Pedesaan, h. 2.

²⁶Febrilia Ika Aresta, "Peranan Bantuan Modal Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM Mandiri Pedesaan) Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di Desa Banyuurip, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo", Skripsi, (Yogyakarta: Fak. Ekonomi, UNY, 2013), h. 32-33.

- 1) peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaanya;
- 2) pelembagaan sistem pembangunan partisipatif;
- 3) pengefektifan fungsi dan peran pemerintah lokal;
- 4) peningkatan kualitas dan kuantitas sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat;
- 5) pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.

3. Tujuan PNPM Mandiri Pedesaan

Tujuan umum PNPM Mandiri Perdesaan adalah meningkatnyakesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaandengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan danpengelolaan pembangunan. Sedangkan tujuan khususnya meliputi:²⁷

- a. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnyamasyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan,pemantauan dan pelestarian pembangunan.
- b. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatifdengan mendayagunakan sumber daya lokal.
- c. Mengembangkan kapasitas pemerintah lokal dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif.
- d. Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomiyang diprioritaskan oleh masyarakat.
- e. Melembagakan pengelolaan dana bergulir.

²⁷Febrilia Ika Aresta, Peranan Bantuan Modal Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM Mandiri Pedesaan) Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Desa Banyuurip, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purworejo”, Skripsi, (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi, UNY, 2013), h. 33-34.

- f. Mendorong terbentuk dan berkembangnya Badan KerjaSama Antar Desa dalam pengelolaan pembangunan masyarakat.
- g. Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan.

4. Prinsip Pokok PNPM Mandiri Pedesaan

Dalam pelaksanaannya, PNPM Mandiri Pedesaan menekankan prinsip-prinsip pokok, yang terdiri dari:²⁸

- a. Transparansi dan Akuntabilitas. Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggung-gugatkan, baik secara moral, teknis, legal maupun administratif.
- b. Desentralisasi. Kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah atau masyarakat, sesuai dengan kapasitasnya.
- c. Keberpihakan pada Orang/ Masyarakat Miskin. Semua kegiatan yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat kurang beruntung.
- d. Otonomi. Masyarakat diberi kewenangan secara mandiri untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola.
- e. Partisipasi/ Pelibatan Masyarakat. Masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong-royong menjalankan pembangunan.

²⁸Bogi Nurmantoro, "Analisis Ekonomi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) Di Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar", Skripsi, (Surakarta: Fakultas Ekonomi, 2011), h. 25-27.

- f. Prioritas Usulan. Pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan, kegiatan mendesak dan bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya masyarakat, dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumberdaya yang terbatas.
- g. Kesenjangan dan Keadilan Gender. Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan tersebut.
- h. Kolaborasi. Semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar-pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan.
- i. Keberlanjutan. Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya untuk saat ini tetapi juga di masa depan, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Prinsip tersebut selain memiliki filosofi yang mencerminkan prinsip-prinsip program dalam arti harafiah, juga ingin mengajak masyarakat untuk kompak bersatu padu dalam mendukung upaya penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah pedesaan. Melalui prinsip ini diharapkan kemandirian desa dapat terwujud.

5. Cakupan Wilayah PNPM Mandiri Pedesaan

Selama pelaksanaan PPK (PPK I, PPK II, PPK III dan PNPM PPK) sejak tahun 1998-2007, program pemberdayaan masyarakat terbesar ini telah menjangkau lebih dari separuh desa termiskin di tanah air. Pada tahun 2007 saja, pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan (PNPM-PPK) menjangkau 26.724 desa dari 1.837 kecamatan di 32 provinsi. Pada tahun 2008, PNPM Mandiri Pedesaan dinikmati di

34.031 desa dari 2.230 kecamatan di 32 provinsi di tanah air. Sedangkan pada tahun 2009, jumlahnya mencapai 50.201 desa dari 3.908 kecamatan di tanah air. Jumlah tersebut belum termasuk desa yang memperoleh pendanaan dari program lain yang melekat pada PNPM mandiri pedesaan, seperti PNPM Generasi Sehat dan Cerdas (PNPM-Generasi), PNPM Rehabilitas dan Rekontruksi Pulau Nias (PNPM-R2PN), PNPM Rencana Strategis Pembangunan Kampung (PNPM Respek), PNPM Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (PNPM-P2SPP), dan lain-lain.

Pada tahun 2010, berdasarkan ancar-ancar lokasi dan alokasi BLM PNPM Mandiri yang dikeluarkan per Agustus 2009, pelaksanaan PNPM Mandiri Pedesaan akan meliputi 4.805 kecamatan di 32 provinsi atau mencapai 75.9% dari total lokasi PNPM Mandiri.

6. Cara Kerja PNPM Mandiri Pedesaan

PNPM Mandiri dilaksanakan melalui upaya-upaya pemberdayaan dan partisipasi masyarakat di wilayah pedesaan melalui tahapan-tahapan berikut:

- a. Sosialisasi dan penyebaran informasi program. Baik secara langsung melalui forum-forum pertemuan maupun dengan mengembangkan/ memanfaatkan media/ saluran informasi masyarakat di berbagai tingkat pemerintah.
- b. Proses partisipatif Pemerataan Rumah Tangga Miskin (RTM) dan pemerataan sosial. Masyarakat diajak untuk bersama-sama menentukan kriteria kurang mampu dan bersama-sama pula menentukan rumah tangga yang termasuk kategori miskin/ sangat miskin (RTM). Masyarakat juga difasilitasi untuk membuat peta sosial desa dengan tujuan agar lebih mengenal kondisi/ situasi sesungguhnya desa mereka, yang berguna untuk menggagas masa depan desa,

penggalan gagasan untuk menentukan kegiatan yang paling dibutuhkan, serta mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemantauannya.

- c. Perencanaan partisipatif di tingkat Dusun, Desa dan Kecamatan. Masyarakat memilih fasilitator Desa atau Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMDD) untuk mendampingi proses sosialisasi dan perencanaan. KPMDD ini kemudian mendapat peningkatan kapasitas untuk menjalankan tugas dan fungsinya dalam mengatur pertemuan kelompok, termasuk pertemuan khusus perempuan untuk melakukan penggalan gagasan berdasarkan potensi sumber daya alam manusia di desa masing-masing, untuk menggagas masa depan desa. Usulan/ gagasan dari masyarakat akan menjadi bahan penyusun Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes).
- d. Seleksi/ Prioritas kegiatan di tingkat desa dan kecamatan. Masyarakat melakukan musyawarah di tingkat desa dan kecamatan untuk memutuskan usulan kegiatan prioritas yang akan didanai. Keputusan akhir mengenai kegiatan yang akan didanai diambil dalam forum Musyawarah Antar Desa (MAD) di tingkat kecamatan yang dihadiri oleh perwakilan tiap desa dalam kecamatan yang bersangkutan. Dalam hal ini, terdapat usulan masyarakat yang belum terdani, maka usulan tersebut akan menjadi bahan kajian dalam forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- e. Masyarakat melaksanakan kegiatan mereka. Dalam forum musyawarah, masyarakat memilih anggotanya sendiri untuk menjadi Unit Pelaksana Kegiatan (UPK) di setiap desa untuk mengelola kegiatan yang diusulkan desa yang bersangkutan dan mendapat prioritas pendanaan program. Fasilitator Teknis PNPM Mandiri Pedesaan akan mendampingi UPK dalam mendisain sarana/

prasarana (bila usulan yang didanai berupa pembangunan infrastruktur pedesaan), penganggaran kegiatan, verifikasi mutu dan supervise. Para pekerja yang terlibat berasal dari warga desa penerima manfaat.

- f. Akuntabilitas dan laporan perkembangan. Skema pelaksanaan kegiatan, UPK harus memberikan laporan perkembangan kegiatan minimal dua kali dalam pertemuan terbuka desa, yakni sebelum program mencairkan dana tahap berikutnya dan pada pertemuan akhir, dimana UPK akan melakukan serah terima kegiatan kepada desa, serta badan operasional dan pemeliharaan kegiatan atau Tim Pengelola dan Pemeliharaan Prasarana (TP3).

7. Sasaran Program PNPM Mandiri Pedesaan

Lokasi sasaran PNPM Mandiri Pedesaan meliputi seluruh kecamatan pedesaan di Indonesia yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan tidak termasuk kecamatan-kecamatan kategori kecamatan bermasalah dalam PPK/PNPM Mandiri Pedesaan. Kelompok sasaran meliputi:

- a. Masyarakat miskin di pedesaan;
- b. Kelembagaan masyarakat di pedesaan;
- c. Kelembagaan pemerintah lokal.

D. Peningkatan Ekonomi

1. Pengertian Peningkatan Ekonomi

Peningkatan adalah sebuah cara yang dilakukan untuk mendapatkan keterampilan atau kemampuan menjadi lebih baik.²⁹ Sedangkan ekonomi atau *economic* dalam banyak literatur ekonomi disebutkan berasal dari bahasa Yunani yaitu kata *Oikos* atau *Oiku* dan *Nomos* yang berarti peraturan rumah tangga. Dengan

²⁹Moeliono, *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), h. 158.

kata lain pengertian ekonomi adalah semua yang menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan dalam rumah tangga, tentu saja yang dimaksud dan dalam perkembangannya kata rumah tangga bukan hanya sekedar merujuk pada satu keluarga yang terdiri dari suami, isteri dan anak-anaknya, melainkan juga rumah tangga yang lebih luas yaitu rumah tangga bangsa, negara dan dunia.³⁰ Masyarakat adalah sekumpulan orang yang hidup bersama pada suatu tempat atau wilayah dengan ikatan aturan tertentu.³¹

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa peningkatan ekonomi masyarakat adalah cara atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam mengatur perekonomian rumah tangga untuk menjadi lebih baik dengan tujuan dapat memenuhi kebutuhan hidup. Peningkatan ekonomi masyarakat yang dimaksudkan di sini adalah peningkatan ekonomi masyarakat di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa setelah adanya PNPM Mandiri Pedesaan.

2. Faktor-Faktor Pertumbuhan Ekonomi

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat atau negara adalah:³²

a. Akumulasi Modal

Akumulasi modal akan terjadi jika ada bagian dari pendapatan sekarang yang ditabung dan kemudian diinvestasikan untuk memperbesar *output* pada masa yang akan datang. Investasi jenis ini sering diklarifikasikan sebagai sektor

³⁰Iskandar Putong, *Economics Pengantar mikro dan Makro*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010), h. 1

³¹Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 994.

³²Subandi, *Ekonomi Pembangunan*, (Cet. 4, Bandung: Alfabeta, 2016), h. 87-89.

produktif (*Directly Productive Activities*), yang berupa pabrik-pabrik, mesin-mesin, peralatan, dan barang-barang baru yang akan meningkatkan stok modal (*capital stock*). Dengan adanya modal, maka akan meningkatkan produktivitas dan membuka lapangan pekerjaan yang baru.

b. Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angkatan kerja (*labor force*) secara tradisional dianggap sebagai faktor yang positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Artinya semakin banyak angkatan kerja berarti semakin banyak faktor produksi tenaga kerja, sedangkan semakin banyak penduduk akan meningkatkan potensi pasar domestik. Pertumbuhan penduduk yang didukung dengan adanya modal, maka dapat meningkatkan perekonomian. Jika dengan adanya modal maka lapangan pekerjaan baru akan terbuka, begitu pula dengan pertumbuhan penduduk, akan meningkatkan tenaga kerja.

c. Kemajuan Teknologi

Kemajuan teknologi merupakan faktor paling penting bagi pertumbuhan ekonomi. Dalam bentuknya yang paling sederhana, kemajuan teknologi disebabkan oleh cara-cara baru dan cara-cara lama yang diperbaiki dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan tradisional, seperti cara menanam padi, membuat pakaian, atau membangun rumah. Ada tiga macam klasifikasi kemajuan teknologi yaitu: netral, hemat tenaga kerja (*labor saving*), hemat modal (*caital saving*).

3. Unsur-Unsur Pokok Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi memiliki unsur-unsur dan sifat sebagai berikut:³³

- a. Suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi secara kontinyu atau berkelanjutan;
- b. Usaha untuk meningkatkan pendapatan per kapita;
- c. Peningkatan pendapatan per kapita itu harus terus berlangsung dalam jangka panjang.
- d. Perbaikan sistem kelembagaan di segala bidang (misalnya ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya). Sistem kelembagaan ini bisa ditinjau dari dua aspek, yaitu aspek perbaikan di bidang aturan main (*rule of the games*), baik aturan formal maupun informal, dan organisasi (*players*) yang mengimplementasikan aturan main tersebut.

4. Karakteristik Pertumbuhan Ekonomi Modern

Simon Kuznets penerima hadiah Nobel dibidang ekonomi pada tahun 1971, ia mendefinisikan pertumbuhan ekonomi suatu negara sebagai “peningkatan kemampuan suatu negara untuk menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya, pertumbuhan kemampuan ini disebabkan oleh kemajuan teknologi dan kelembagaan serta penyesuaian teknologi yang dibutuhkan”. Ketiga komponen pokok dari definisi ini sangat penting artinya, karena:³⁴

³³Licolin Arsyad, *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Ed. 3, (Cet. 1, Yogyakarta: BPFE, 2016), h. 8.

³⁴Subandi, *Ekonomi Pembangunan*, (Cet. 4, Bandung: Alfabeta, 2016), h.89.

- a. Kenaikan *output* nasional secara terus-menerus merupakan perwujudan dari pertumbuhan ekonomi dan kemampuan untuk menyediakan berbagai macam barang ekonomi merupakan tanda kematangan ekonomi;
- b. Kemajuan teknologi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, namun belum merupakan syarat yang cukup. Untuk merealisasi potensi pertumbuhan yang terkandung dalam teknologi baru; maka
- c. Penyesuaian kelembagaan, sikap dan ideologi harus dilakukan. Inovasi teknologi tanpa disertai inovasi sosial ibarat bola lampu tanpa aliran listrik. Potensi ada tetapi tanpa *input* yang melengkapi, maka tidak akan berarti apa-apa.

Dalam analisisnya, Kuznets memisahkan enam karakteristik yang terjadi dalam proses pertumbuhan ekonomi pada hampir setiap negara maju, yaitu:³⁵

- a. Dua Variabel Ekonomi Agregatif
 - 1) Tingginya tingkat pertumbuhan *output* per kapita dan penduduk.
 - 2) Tingginya tingkat kenaikan produktivitas faktor produksi secara keseluruhan, terutama produktivitas tenaga kerja.
- b. Dua Variabel Transformasi Struktural
 - 1) Tingginya tingkat transformasi struktur ekonomi.
 - 2) Tingginya tingkat transformasi sosial ideologi.
- c. Dua Kecenderungan Mempengaruhi Meluasnya Pertumbuhan Ekonomi Internasional
 - 1) Kecenderungan negara-negara maju secara ekonomis untuk menjangkau seluruh dunia untuk mendapatkan pasar dan bahan baku.
 - 2) Pertumbuhan ekonomi ini hanya terbatas pada sepertiga populasi dunia.

³⁵Subandi, *Ekonomi Pembangunan*, h. 90.

E. Ekonomi Islam

1. Pengertian Ekonomi Islam

Ekonomi secara umum didefinisikan sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia.³⁶

Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuh kebutuhan yang terbatas di dalam kerangka syariah. Ilmu yang mempelajari perilaku seorang muslim dalam suatu masyarakat Islam yang dibingkai dengan syariah. Definisi tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompotibel atau bergerak sebagaimana mestinya dan tidak universal. Karena dari definisi tersebut mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan yang apriori (*apriory judgement*), benar atau salah harus diterima.³⁷

2. Pertumbuhan Ekonomi dalam Islam

Islam Mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai perkembangan yang terus-menerus dari faktor produksi secara benar yang mampu memberikan kontribusi bagi kesejahteraan manusia.³⁸ Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi menurut Islam merupakan hal yang sarat nilai. Suatu peningkatan yang dialami oleh faktor produksi tidak dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi jika produksi tersebut

³⁶Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2011), h. 14.

³⁷Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: LPPI, 2006), h. 6.

³⁸Abdul Hasan Muhammad Sadeq, *Economic Development in Islam*, (Malaysia: Pelanduk Publication, 1991), h. 5-6.

misalnya memasukkan barang-barang yang terbukti memberikan efek buruk dan membahayakan manusia.

Terdapat beberapa perbedaan dalam menilai pertumbuhan ekonomi dalam Islam dengan konsep kapitalis. Perbedaan tersebut berangkat dari sudut pandang yang berbeda tentang makna dan tujuan hidup. Berangkat dari sudut dasar kapitalis yang tujuan utamanya merupakan pemenuhan kebutuhan materi tanpa batas, maka munculah sikap pemenuhan kebutuhan terhadap barang-barang atau jasa tanpa batas pula. Sedangkan dalam Islam, walaupun memandang materi itu perlu, akan tetapi Islam tidak melupakan unsur-unsur moral spiritual dan tidak meletakkan materi sebagai tujuan utama, karena dalam ajaran Islam, manusia tidak hanya menjalani hidup di dunia, akan tetapi manusia akan dibangkitkan kembali kelak di akhirat. Sikap demikian sejak pertama sudah terintegrasi atau menyatu dalam kehidupan, baik sosial, politik atau ekonomi.³⁹

3. Karakteristik Pertumbuhan Ekonomi Islam

Abdullah Abdul Husain at-Tariqi (Penulis *Al-Iqtishad al-Islami: Ususun wa Mubaun wa Ahdaf*) pada tahun 2004 menguraikan mengenai beberapa karakteristik dalam pertumbuhan ekonomi Islam sebagai berikut:⁴⁰

a. Serba Meliputi

Islam melihat bahwa pertumbuhan lebih dari sekedar materi dan memiliki tujuan yang lebih universal dibandingkan dengan orientasi terbatas yang ingin dicapai oleh sistem-sistem kontemporer yaitu menciptakan keadilan sosial. Islam berada di

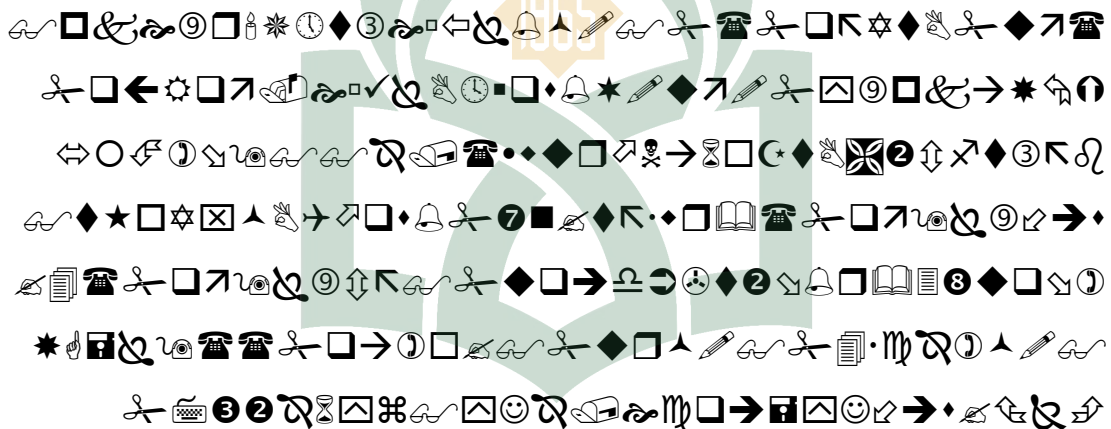
³⁹Muhammad Abdul Mannan, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek Dasar-dasar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993), h. 379.

⁴⁰Nurul Huda, Dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam*, Ed.1, (Cet. 2, Jakarta: Kencana, 2017), h. 126-128.

posisi lebih utama di mana yang ingin diciptakan yaitu masyarakat yang sempurna dari semua aspek. Masyarakat yang mencerminkan keadilan sosial dalam aturan-aturan buatan manusia hadir dalam bentuk yang hambar jika dibandingkan dengan tujuan-tujuan penting yang ingin dijaga oleh Islam secara esensi atau inti, yaitu untuk menciptakan masyarakat yang sempurna.

b. Berimbang

Pertumbuhan ekonomi Islam tidak hanya diorientasikan untuk menciptakan pertambahan produksi, tetapi juga ditujukan berlandaskan keadilan distribusi sesuai yang diajarkan dalam QS. Al-Maidah/5 ayat 8.



Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”⁴¹

⁴¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Lembaga Percetakan Al-Qur'an Raja Fahd), h. 159.

Keadilan dilakukan dengan melakukan kebaikan kepada semua manusia dalam kondisi apa pun. Tujuan pertumbuhan ekonomi dalam Islam yaitu adanya kesempatan bagi semua masyarakat untuk mendapatkan kecukupan, bukan kekurangan.

c. Realistis

Realistis adalah suatu pandangan terhadap permasalahan yang sesuai dengan kenyataan. Sifat realistis dalam bidang pertumbuhan ekonomi menjelaskan bahwa Islam melihat persoalan ekonomi dan sosial yang mungkin terjadi di masyarakat Islam dengan tawaran solusi yang juga realistis. Contohnya, Islam menerapkan aturan zakat untuk menanggulangi kemiskinan.

d. Keadilan

Islam dalam menegakkan hukum-hukumnya selalu berdasarkan landasan keadilan di antara manusia. Allah selalu memerintahkan untuk berbuat adil dalam banyak ayat Al-Qur'an. Allah berfirman dalam QS. An-Nahl/16 ayat 90:



Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji,

kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”⁴²

e. Bertanggung jawab

Adanya tanggung jawab sebagai salah satu pondasi paling penting diungkapkan secara jelas dan mudah dimengerti dalam syariat Islam. Jika mengikuti syariat ini, maka dapat disimpulkan bahwa adanya tanggung jawab di dua sisi:

- 1) Tanggung jawab antara sebagian masyarakat dan sebagian golongan lainnya;
- 2) Tanggung jawab negara terhadap rakyatnya.

f. Mencukupi

Islam tidak hanya menetapkan adanya karakteristik tanggung jawab, namun tanggung jawab itu harus mutlak dan mampu mencakup realisasi kecukupan bagi semua manusia. Oleh karena itu, Islam membagi tanggung jawab itu sebagai kewajiban atas golongan kaya, kerabat, orang-orang yang diberi kemudahan, dan negara sehingga semua potensi ini menjadi sinergi besar untuk mengatasi persoalan kemiskinan.

g. Berfokus pada Manusia

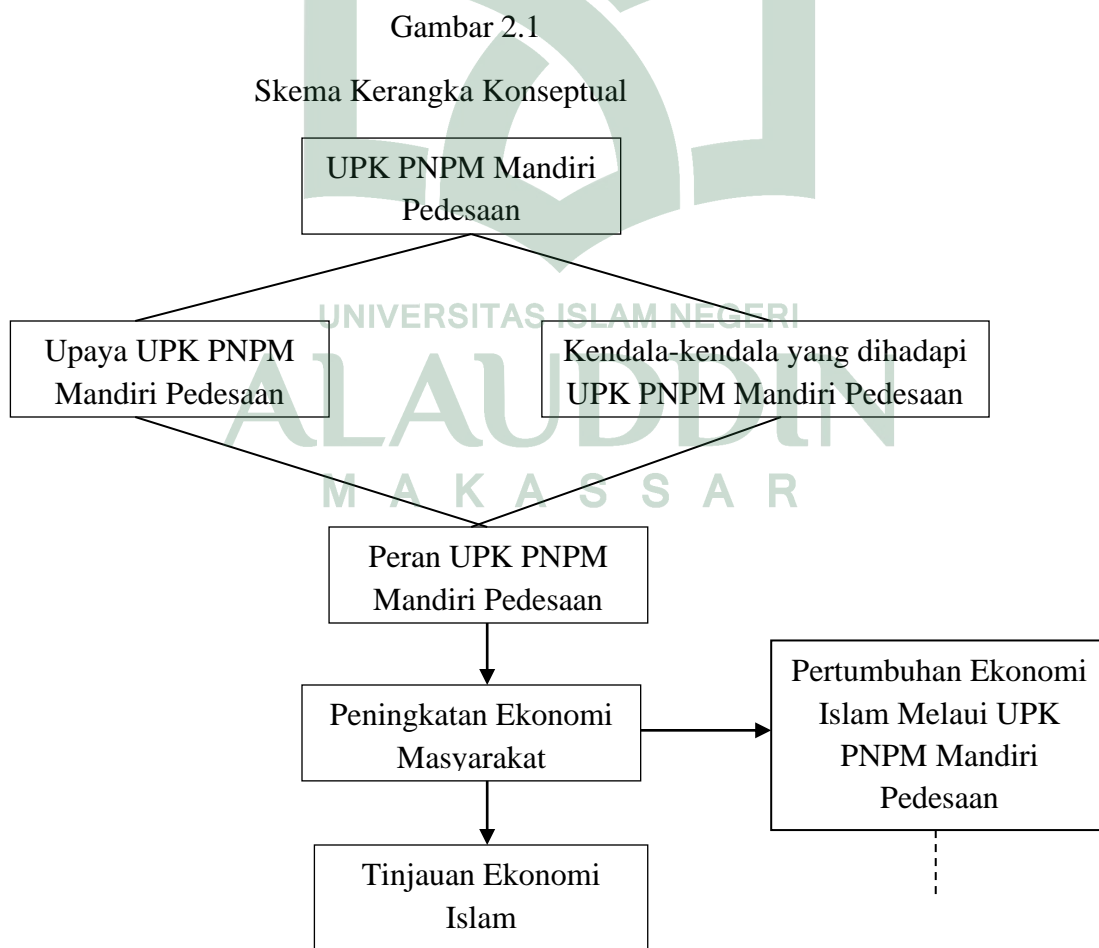
Karakter ini sesuai dengan posisi manusia yang merupakan duta Allah di muka bumi, dan inilah yang mencirikan tujuan pengaruh pertumbuhan ekonomi dalam Islam. Pertumbuhan dalam Islam ditujukan untuk menciptakan batas kecukupan bagi seluruh warga negara agar ia terbebas dari segala bentuk penghambaan baik dalam bidang finansial maupun bidang hukum, kecuali hanya penghambaan kepada Allah. Fokus pertumbuhan ekonomi Islam tidak lain adalah

⁴²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Lembaga Percetakan Al-Qur'an Raja Fahd), h. 415.

manusia itu sendiri agar tidak diperbudak materi sebagaimana kaum kapitalis, dan menjadi hina karena tidak memiliki kebebasan sebagaimana dalam ekonomi sosial.

F. Kerangka Konseptual

Kerangka pikir adalah keseluruhan kegiatan penelitian sejak dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan penyelesaian dalam satu kesatuan yang utuh. Kerangka pemikiran digunakan untuk mempermudah arah dari penelitian. Kerangka pikir dalam penelitian ini secara sistematis dapat digambarkan sebagai berikut:



Keterangan:

Penelitian ini akan menganalisis UPK Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan melalui upaya yang dilakukan serta kendala-kendala yang dihadapi sehingga dapat dikatakan berperan dalam peningkatan ekonomi. Setelah mengetahui peran UPK PNPM Mandiri Pedesaan dalam peningkatan ekonomi masyarakat, selanjutnya diperhatikan pertumbuhan ekonomi menurut Islam melalui UPK PNPM Mandiri Pedesaan. Kemudian peran UPK PNPM Mandiri Pedesaan ini di tinjau kembali ke dalam ekonomi Islam.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam suatu penelitian, jenis penelitian dapat dilihat dari tujuan, sifat, bentuk dan sudut pandang penerapannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari dan memahami secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan sesuai dengan unit sosial, individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat.⁴³ Dengan demikian, metode yang digunakan berupa metode wawancara kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Toppobulu yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara, serta masyarakat yang terlibat langsung sumber data primer.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Toppobulu yang terletak di Jl. Masjid Raya, No. 133, Malakaji serta masyarakat yang terlibat langsung dalam UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Toppobulu.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif yaitu penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta

⁴³Nur Indrianto dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Yogyakarta: BPFE, 2010), h. 146

saat ini dari suatu populasi yang meliputi kegiatan penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, organisasi, keadaan, ataupun prosedur.⁴⁴ Penelitian ini menggambarkan tentang realitas yang ada di lapangan yakni peran UPK PNPM Mandiri Pedesaan dalam peningkatan ekonomi masyarakat kemudian dilihat melalui perspektif Ekonomi Islam, untuk kemudian dianalisa dengan menggunakan kata. Artinya data yang dikumpulkan tidak berupa angka-angka, melainkan data tersebut berdasarkan naskah wawancara, catatan lapangan dan dokumen pribadi.

C. Sumber Data

Sumber data adalah tempat di mana kita dapat memperoleh data. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objeknya.⁴⁵ Data primer diperoleh dari lokasi penelitian yaitu UPK Program nasional pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan yang terletak di Jl. Masjid Raya Malakaji Kecamatan Tompobulu serta masyarakat yang terlibat langsung dalam UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Tompobulu.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk

⁴⁴Sudaryono, *Metode Penelitian*, Ed. 1, (Cet. 1, Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 82.

⁴⁵Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Ed. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 101-102.

publikasi.⁴⁶Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen dan artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan narasumber tetapi dapat juga diberikan daftar pertanyaan dahulu untuk dijawab pada kesempatan lain.⁴⁷ Wawancara dilakukan secara langsung dengan UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Tompobulu, masyarakat yang terlibat langsung dalam PNPM Mandiri Pedesaan dan tokoh-tokoh ekonomi Islam, guna melengkapi data yang diperlukan tentang peran PNPM Mandiri Pedesaan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Kecamatan Tompobulu.

2. Observasi

Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.⁴⁸ Observasi dilakukan secara langsung pada UPK dan masyarakat yang terlibat dalam PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Tompobulu.

⁴⁶Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, h. 102.

⁴⁷Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Ed. 1, (Cet. 1, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2011), h. 138.

⁴⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Cet. 27, Jakarta: Alfabeta, 2018) h. 145.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁴⁹ Metode dokumenter adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Pada intinya metode dokumenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis.⁵⁰ Dokumenter secara langsung dilakukan pada UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Tompobulu.

E. Instrument penelitian

Instrument penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan data agar kegiatan yang dilakukan menjadi sistematis. Adapun penelitian ini, penulis akan menggunakan instrument penelitian seperti pedoman wawancara, pedoman observasi, maupun dokumentasi.

F. Analisi Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data secara deskriptif kualitatif. Yakni setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

⁴⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Cet. 9, Bandung: Alfabeta, 2017), h. 326.

⁵⁰M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*, Ed. 1, (Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2013), h. 153

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model miles dan Huberman, yang tahapannya berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.⁵¹

1. Pengumpulan Data (*Data Collectin*)

Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi.

2. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, serta mencarinya jika diperlukan.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Proses selanjutnya setelah mereduksi data adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchard* (alur), dan sejenisnya. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

4. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Daving/Verification*)

Langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan dan verivikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih

⁵¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Cet. 9, Bandung: Alfabeta, 2017), h.336

belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kasual atau interaktif, hipotesis atau teori.

Penelitian merupakan suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.⁵²

G. Pengujian Keabsahan Data

Penelitian dalam kualitatif, instrumennya adalah manusia, karena itu yang diperiksa adalah keabsahan datanya. Untuk menguji kredibilitas data peneliian, peneliti menggunakan teknik triangulasi.

Teknik triangulasi data yaitu mengumpulkan data dari berbagai metode dan dengan cara menyilangkan informasi yang diperoleh agar data yang didapatkan lebih lengkap dan sesuai dengan yang diharapkan. Setelah mendapatkan data yang jenuh, yaitu keterangan yang didapat dari sumber-sumber data telah sama, maka data yang didapatkan lebih kredibel.⁵³

Sugiyono membedakan empat macam triangulasi, diantaranya dengan memanfaatkan sumber, artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Adapun untuk mencapai kepercayaan itu, maka ditempuh langkah sebagai berikut:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data wawancara.
- b. Membandingkan apa yang dikatakan oleh orang di depan umum dengan yang dikatakan secara pribadi.

⁵²Sudaryono, *Metode Penelitian*, Ed. 1, (Cet. 1, Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 54.

⁵³Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, Ed. 1, (Cet. 1, Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 82

- c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian apa yang dikatakan sepanjang waktu.
- d. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Jadi, setelah penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi, kemudian data hasil penelitian itu dihubungkan sehingga saling melengkapi.



BAB 1V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Tompobulu secara etimologi berasal dari dua kata dalam bahasa Makassar yakni *Tompo* dan *Bulu*. Tompo bermakna puncak, ketinggian, atau di atas, sedangkan Bulu bermakna gunung. Dengan demikian, Tompobulu dapat diartikan sebagai wilayah yang berada di pegunungan. Kecamatan Tompobulu beribukota di Malakaji, berjarak sekitar 147 km dari Sungguminasa, ibukota kabupaten Gowa. Merupakan daerah dataran tinggi dengan rata-rata ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut.

1. Batas Wilayah dan Akses

Tompobulu berbatasan dengan Kabupaten Sinjai pada sebelah utara, Kabupaten Jeneponto sebelah selatan, Kecamatan Biringbulu sebelah barat, dan Kabupaten Jeneponto di sebelah timur. Terdapat beberapa akses mencapai kecamatan ini antara lain akses jalan Pallangga-Bungaya, jalan Palлеко (Takalar)-Biringbulu, dan Sungguminasa-Jeneponto. Akses utama yang dipergunakan warga sejak puluhan tahun silam akses terakhir jalan nasional yang menghubungkan Makassar ke Jeneponto, karena dua akses pertama kondisi jalannya masih kurang baik, selain jalur itu dipenuhi tanjakan.

2. Wilayah Administratif dan Penduduk

Kecamatan Tompobulu dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gowa Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kecamatan di Kabupaten Gowa. Penduduk Tompobulu umumnya berprofesi sebagai petani padi,

palawija, dan berkebun kopi, sebagai warga bergerak pada usaha sektor non pertanian terutama perdagangan.

Tabel 4.1
Gambaran Umum Kecamatan Tompobulu

No	Desa/Kelurahan	Luas Wilayah	JumlahPenduduk			Rumah Tangga
			Laki-laki	Perempuan	Total	
1	Desa Rappoala	20.96 km ²	1261	1399	2660	761
2	Desa Rappolemba	20.70 km ²	2253	2401	4654	1239
3	Desa Datara	11.61 km ²	1633	1803	3436	986
4	Desa Garing	18.03 km ²	1655	1804	3459	1040
5	Desa Bontobuddung	9.13 km ²	1073	1118	2191	611
6	Desa Tanete	22.81 km ²	1861	2003	3864	1076
7	Kelurahan Cikoro	17.33 km ²	2183	2216	4399	1132
8	Kelurahan Malakaji	11.11 km ²	1943	2142	4085	1156
Total		131.68 km ²	13862	14886	28748	8001

Sumber: Profil Kecamatan Tompobulu Tahun 2018.

3. Sarana Pendidikan

Beberapa fasilitas umum yang terdapat di Tompobulu seperti sarana pendidikan antara lain:

- a. Taman Kanak-kanak (TK) : 6 Unit
- b. Sekolah Dasar Negeri (SDN) : 11 Unit
- c. Sekolah Dasar Inpres (SDI) : 11 Unit
- d. Sekolah Menengah Pertama (SMP) : 5 Unit
- e. Sekolah Menengah Atas (SMA) : 2 Unit
- f. Madrasah Ibtidaiyah (MI) : 6 Unit
- g. Madrasah Tsanawiyah (MTs) : 4 Unit
- h. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) : 1 Unit

- i. Madrasah Aliyah (MA) : 2 Unit

B. Upaya UPK PNPM Mandiri Pedesaan dalam Peningkatan Ekonomi di Kecamatan Tompobulu

Indonesia memiliki persoalan kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan dan pengangguran ini lebih dipicu oleh rendahnya kesempatan kerja bagi angkatan kerja di pedesaan. Upaya untuk menanggulangnya harus menggunakan pendekatan multi disiplin yang berdimensi pemberdayaan. Sejalan dengan itu, pemerintah Indonesia telah mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. PNPM Mandiri ini ada beberapa macam, diantaranya PNPM Mandiri Pedesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, dan lainnya.

PNPM Mandiri Pedesaan adalah program yang dicanangkan pemerintah untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Di Kecamatan Tompobulu sendiri, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan mulai beroperasi sejak tahun 2008.

Secara umum, awal mula terbentuknya UPK PNPM mandiri Pedesaan di Kecamatan Tompobulu didasari oleh keprihatinan pemerintah terhadap usaha kecil mikro yang selama ini kesulitan memperoleh pinjaman modal. Seperti yang disampaikan Bapak Drs. H. Abdul Karim HI selaku ketua UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Tompobulu pada wawancaranya tanggal 10 Oktober 2019.⁵⁴

Di Kecamatan Tompobulu ini banyak usaha-usaha kecil yang membutuhkan bantuan modal, tetapi jika meminjam pada lembaga keuangan seperti bank, harus melewati beberapa prosedur yang terbilang cukup rumit dan dengan jaminan, sementara kita liat masyarakat kecamatan Tompobulu ini sebagian besar berada pada golongan ekonomi menengah ke bawah, lalu apa yang mereka bisa jaminkan. Nah, kemudian ada cara memperoleh dana cepat, yaitu

⁵⁴Drs. H. Abdul Karim. HI (Ketua UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Tompobulu) Wawancara, pada tanggal 10 Oktober 2019.

melalui rentenir dengan bunga yang tinggi. Untuk daerah Tompobulu sendiri, bunga yang diberikan oleh rentenir rata-rata 5-10%, bahkan ada yang sampai di atas 10%. Ini bukan menjadi solusi bagi masyarakat, akan tetapi menambah beban masyarakat. Dengan demikian, pemerintah kemudian merancang bahwa UPK PNPM itu harus mempunyai jasa simpan pinjam, yang kemudian dikenal dengan sebutan Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

UPK PNPM Mandiri pedesaan Kecamatan Tompobulu dimulai pada tahun 2008. Pada awalnya program-program UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Tompobulu terdiri dari kegiatan pembangunan sarana dan prasarana dasar (pembangunan infrastruktur) yang dapat memberikan manfaat jangka panjang maupun jangka panjang secara ekonomi bagi masyarakat miskin atau rumah tangga miskin, serta program penambahan permodalan simpan pinjam untuk kelompok perempuan (Simpan Pinjam Perempuan) yang bertujuan untuk mengembangkan potensi simpan pinjam pedesaan yang bebas dari lintah darat, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja.

Setelah tahun 2014 UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Tompobulu tidak lagi mendapat sokongan dana dari pemerintah. Sehingga mulai tahun 2015 UPK PNPM Mandiri Pedesaan hanya mengelola dana dan aset yang tersisa. Dengan demikian, program yang berjalan hingga saat ini hanya program simpan pinjam perempuan. Program simpan pinjam perempuan yang merupakan program unggulan dari UPK PNPM Mandiri Pedesaan ini mendapat respon yang sangat baik dari masyarakat. Ini disampaikan oleh bapak Haedar AK. selaku sekretaris UPK PNPM Mandiri Kecamatan Tompobulu pada wawancara tanggal 10 Oktober 2019, yang menyatakan bahwa:⁵⁵

⁵⁵Haedar AK (Sekretaris UPK PNPM Mandiri Kecamatan Tompobulu) Wawancara, Pada tanggal 10 Oktober 2019.

Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ini adalah program yang kami kelola sejak tahun 2008 hingga saat ini. Alhamdulillah respon masyarakat terhadap program ini sangat baik, kemudian perkembangannya juga cukup bagus, karena dari jasa yang kita dapatkan dari pengelolaan ini kita gulirkan kembali. Inilah yang membuat program SPP ini berkembang walau pun tidak begitu signifikan, karena jasa yang kami berikan hanya 1.17%. Ini jika dibandingkan dengan koperasi-koperasi yang lain tentu perkembangan mereka jauh lebih pesat. Tapi, *Inshaallah* sampai sekarang kami tetap optimis bahwa program ini akan berjalan dengan baik apalagi jika tingkat kesadaran masyarakat lebih tinggi dalam pengembalian dananya.

Seperti yang disampaikan bapak Haedar AK pada wawancaranya, program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ini merupakan program yang berperan langsung dalam peningkatan ekonomi khususnya untuk penambahan modal bagi usaha kecil mikro. Untuk program simpan pinjam ini sendiri, jumlah pinjaman yang diberikan kepada setiap anggotanya maksimal Rp. 5.000.000.- (Lima juta rupiah).

Dalam wawancara lain dijelaskan pula oleh Ibu Rahmatia S. selaku bendahara UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Tompobulu.⁵⁶

Untuk program Simpan Pinjam Perempuan ini kami memberi pinjaman maksimal Rp. 5.000.000.- (Lima juta rupiah) per orang, ini disesuaikan dengan kebutuhan anggota yang diusulkan dalam proposalnya. Dan untuk angsuran pengembaliannya sendiri ada yang 10-24 bulan, itu tergantung dari permintaan nasabahnya juga.

Jenis-jenis usaha yang mengajukan pinjaman ke UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Tompobulu ini ada beberapa jenis, diantaranya masyarakat yang memiliki warung sembako, pemilik usaha kue, peternak ayam potong dan ayam petelur, petani dan usaha lainnya.

Perguliran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) merupakan Proses dan tata cara perputaran dana modal usaha yang berasal dari pengembalian pokok pinjaman

⁵⁶Rahmatia S. (Bendahara UPK PNPM Mandiri Kecamatan Tompobulu), Wawancara, padatangal 10 Oktober 2019.

ditambah pengembalian jasa pinjaman dan kegiatan ekonomi produktif yang dilaksanakan oleh kelompok sehingga dana tersebut dapat bergulur.

Adapun tujuan dari perguliran dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ini adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan dana yang dapat dipinjam secara bergantian oleh kelompok yang membutuhkan pinjaman sehingga dapat membantu menyediakan modal usaha bagi anggota kelompok.
2. Menjamin pelestarian dan pengembangan dana yang digunakan untuk usaha ekonomi sehingga menjadi dana abadi dan mudah dijangkau oleh kelompok yang mempunyai usaha ekonomi produktif.

Prosedur pemberian pinjaman pada UPK PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Tompobulu sama seperti tahapan-tahapan pemberian pinjaman pada umumnya, yaitu:

1. Permohonan

Simpan Pinjam Perempuan (SPP) pada UPK PNPM Mandiri Pedesaan ini diberikan bukan secara perorangan, tetapi berkelompok. Masyarakat yang ingin mengajukan permohonan pinjaman harus membentuk kelompok terlebih dahulu agar bisa mendapatkan dana bantuan dari UPK PNPM Mandiri Pedesaan. Pembentukan Kelompok sepenuhnya diserahkan pada masyarakat yang ditunjuk sebagai kelompok sasaran.

2. Syarat-syarat

Adapun syarat yang diberikan oleh UPK PNPM Mandiri Pedesaan untuk mendapatkan dana pinjaman adalah:

- a. Surat permohonan kredit

- b. Berita acara pembentukan kelompok SPP
- c. Daftar calon penerima manfaat
- d. Surat tanggung renteng
- e. Rencana angsuran
- f. Fotocopy KK dan KTP
- g. Fotocopy Rekening bank
- h. Surat rekomendasi dari desa/kelurahan.

Setelah adanya dan simpan pinjam dari UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Tompobulu, masyarakat menjadi lebih mandiri dengan mendirikan usaha-usaha kecil dari bantuan dana pinjaman UPK PNPM Mandiri Pedesaan, sehingga dapat membantu keuangan dan meningkatkan perekonomian keluarga. Seperti yang disampaikan Kasi Pemdes Kecamatan Tompobulu, bapak Darmawansyah SE., dalam wawancara pada tanggal 11 Oktober 2019.⁵⁷

“Semenjak adanya UPK PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Tompobulu, masyarakat sangat terbantu karna untuk memperoleh modal tidak lagi mengalami kesulitan. *Alhamdulillah*, banyak masyarakat yang mulai merangkak keluar dari garis kemiskinan setelah mendapat bantuan dana pinjaman dari UPK PNPM Mandiri Pedesaan. Dengan adanya bantuan ini, masyarakat bisa meningkatkan jumlah pendapatannya dengan membuat usaha-usaha kecil, usaha sampingan dari bantuan pinjaman UPK PNPM ini yang tentunya tidak diberatkan dalam hal pengembalian. Jadi menurut saya, UPK PNPM Mandiri Pedesaan ini sangat berperan terhadap peningkatan ekonomi khususnya di kecamatan Tompobulu ini.”

Pernyataan Bapak Darmawansyah dibenarkan oleh Ibu Suriani, pemilik usaha kue yang mendapat bantuan modal dari simpan pinjam perempuan UPK PNPM

⁵⁷Darmawansyah, SE., (Kasi Pemdes Kecamatan Tompobulu) *Wawancara*, pada tanggal 11 Oktober 2019

Mandiri Pedesaan Kecamatan Tompobulu pada wawancara tanggal 14 Oktober 2019.⁵⁸

“Dulu sebelum bergabung jadi Anggota UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Tompobulu, usaha kue saya hanya mampu memproduksi paling banyak 4 kg kue kering perhari karena keterbatasan alat dan bahan. Sekarang setelah bergabung jadi anggota UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Tompobulu saya dapat bantuan modal, jadi usaha saya bisa dikembangkan dan perharinya sudah bisa memproduksi sampai 10 kg kue kering.”

Dalam wawancara di atas dapat dilihat bagaimana perkembangan ekonomi masyarakat setelah adanya UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Tompobulu. Setelah mendapat bantuan pinjaman modal usaha dari UPK PNPM Mandiri Kecamatan Tompobulu, masyarakat bisa mengembangkan usahanya sehingga pendapatannya lebih meningkat daripada sebelum bergabung dengan UPK PNPM Mandiri Kecamatan Tompobulu. Selain ibu Suriani, hal serupa juga dialami oleh ibu Reski Ariati, seorang perawat honorer yang kemudian membuka usaha peternakan ayam potong setelah mendapat pinjaman modal dari UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Tompobulu.⁵⁹

“kalau hanya mengandalkan gaji jadi honorer dan penghasilan suami dari bertani tentu tidak akan mencukupi kebutuhan keluarga saya dan keluarga, kemudian saya berinisiatif untuk mengajukan pinjaman modal ke UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Tompobulu dan membuka usaha ayam potong. Sampai sekarang saya masih aktif mengajukan pinjaman, dan *Alhamdulillah* usaha ternak ayam potong saya sudah berkembang dan sudah ada di dua tempat.”

Dari wawancara-wawancara dengan informan, dapat dilihat bahwa UPK PNPM Mandiri Pedesaan kecamatan Tompobulu memegang peranan penting dalam

⁵⁸Suriani, (Anggota UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Tompobulu), *Wawancara* pada tanggal 14 Oktober 2019.

⁵⁹Reski Ariati, (Anggota UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Tompobulu), *Wawancara* pada tanggal 14 Oktober 2019.

peningkatan ekonomi bagi masyarakat Kecamatan Tompobulu. Melihat bahwa UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Tompobulu merupakan lembaga yang menyajikan program simpan pinjam untuk masyarakat golongan menengah ke bawah agar bisa membuka dan mengembangkan usahanya guna untuk meningkatkan pendapatan. UPK PNPM Mandiri pedesaan menjadi lembaga penyediaan modal yang diunggulkan di Kecamatan Tompobulu dikarenakan prosedur peminjaman yang tidak terlalu sulit seperti lembaga lain, juga jasa yang di tawarkan relatif kecil dan tidak memberatkan bagi masyarakat.

Selain meningkatkan pendapatan masyarakat melalui program simpan pinjam, UPK PNPM Mandiri Kecamatan Tompobulu setiap tahun semakin menjangkau banyak masyarakat. Dengan meningkatnya aset UPK PNPM Mandiri Kecamatan Tompobulu, maka masyarakat yang menerima dampaknya akan semakin bertambah pula. Sehingga masyarakat semakin berpeluang untuk mendapat pinjaman modal dan menambah pendapatannya.

C. Kendala yang Dihadapi UPK PNPM Mandiri Pedesaan dalam Upaya Peningkatan Ekonomi di Kecamatan Tompobulu

Walaupun dengan adanya program UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Tompobulu ini sangat membantu masyarakat terutama dalam meningkatkan pendapatan, namun ada beberapa kendala yang terjadi dan menyebabkan kurang terciptanya kesejahteraan dan kemandirian bagi masyarakat, terutama bagi anggota kelompok simpan pinjam. Adapun kendala-kendala tersebut adalah:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan dana dari program UPK PNPM Mandiri Pedesaan ini untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha yang telah mereka rintis. Kendala ini terjadi karena kebanyakan

masyarakat menganggap bahwa untuk mendapatkan dana pinjaman dari UPK PNPM Mandiri Pedesaan ini sama susahnyanya dengan pinjaman yang diajukan di perbankan. Sehingga dengan hal tersebut menyebabkan kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan dana pinjaman dari UPK PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Tompobulu.

2. Kurangnya kesadaran anggota kelompok simpan pinjam untuk mengembalikan dana tepat waktu. Kendala tersebut terjadi karena sebagian anggota kelompok menggunakan dananya untuk kebutuhan sehari-hari bukan untuk modal usaha, sehingga untuk pengembalian mereka harus menyisihkan dari uang belanja. Seperti yang disampaikan oleh ketua kelompok simpan pinjam perempuan, ibu Syamsiah dalam wawancaranya.⁶⁰
 “Ada dari beberapa anggota yang dananya dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sehingga mengalami kesulitan dalam pengembalian karena bergantung pada kelebihan uang belanjanya.”
3. Menurut sebagian nasabah, yang menjadi kendala bagi mereka dalam meningkatkan usaha yang mereka jalankan adalah karena waktu pencairan dari dana yang mereka pinjam ke UPK PNPM Mandiri Pedesaan kadang mengalami keterlambatan. Seperti yang disampaikan oleh ibu Hikma dalam wawancaranya.⁶¹
 “kadang kita sudah butuh dananya, tapi belum cair. Kadang juga harus menunggu sampai sebulan baru cair.”

⁶⁰Syamsiah, (Ketua Kelompok Bantimiring Simpan Pinjam Perempuan UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Tompobulu), *Wawancara* pada tanggal 15 Oktober 2019.

⁶¹Hikma, (Anggota Kelompok Simpan Pinjam Perempuan UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Tompobulu), *Wawancara* pada tanggal 15 Oktober 2019.

Pernyataan ibu Hikma di atas, dibenarkan oleh ibu Rahmatiah S. bendahara

UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Tompobulu.⁶²

“karena banyak anggota kelompok yang menunggak dalam pembayaran menyebabkan banyak kelompok yang harus menunggu untuk pencairan karena kita kekurangan dana.”

Sebagaimana yang dipaparkan di atas, ketiga kendala tersebut adalah yang seringkali dialami oleh UPK PNPM Mandiri Pedesaan dan Anggota kelompok. Menyikapi kendala-kendala tersebut, yang pada dasarnya mengarah pada pengembalian dana, UPK PNPM Mandiri Kecamatan Tompobulu telah berusaha melakukan upaya-upaya untuk menyelesaikan persoalan yang ada, seperti yang disampaikan oleh sekretaris UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Tompobulu.⁶³

“kita mengatasi kendala-kendala ini dengan beberapa cara, seperti cara kekeluargaan, kita telephone, didatangi langsung. Kadang juga kita keluar membawa pendamping seperti tim verifikasi, tim pendanaan, kadang juga didampingi petugas dari pihak polsek atau pihak koramil”

Selain UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Tompobulu, anggota kelompok juga berupaya untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi pada proses pengembalian. Seperti yang dilakukan oleh ketua kelompok Bantimurung yang disampaikan dalam wawancaranya.⁶⁴

“Karena tdiak semua anggota lancar dalam pembayarannya, jadi kadang saya harus menutupi tunggakan dari anggota untuk melunasi pengembalian. jadi kadang untuk bulan selanjutnya anggota yang menunggak membayar untuk 2 bulan, bulan lalu dan bulan sekarang, kadang juga di bayar lewat beberapa hari dari tanggal pengembalian.”

⁶²Rahmatia S., (Bendahara UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Tompobulu), *Wawancara* pada tanggal 10 Oktober 2019.

⁶³Haedar AK., (Sekretaris UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Tompobulu), *Wawancara* pada tanggal 10 Oktober 2019.

⁶⁴Syamsiah, (Ketua Kelompok Bantimurung Simpan Pinjam Perempuan UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Tompobulu), *Wawancara* pada tanggal 15 Oktober 2019.

Dalam menyikapi kendala-kendala yang terjadi, baik UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Tompobulu maupun anggota kelompok simpan pinjam masing-masing memiliki strategi dalam menghadapi kendala kendalanya. Sehingga mereka mengupayakan agar program simpan pinjam dari UPK PNPM Mandiri Kecamatan Tompobulu ini tetap berjalan lancar sebagaimana yang diinginkan.

D. Faktor-faktor Pertumbuhan Ekonomi Melalui UPK PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Tompobulu

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kecamatan Tompobulu melalui UPK PNPM Mandiri Pedesaan adalah sebagai berikut:

1. Akumulasi Modal

Akumulasi modal adalah proses penambahan persediaan modal (*capital stock*) fisik bersih dalam suatu perekonomian dalam upaya untuk meningkatkan total *output*. Dalam UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Tompobulu, anggaran dana yang dikelola setiap tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 sebesar Rp. 2.575.000.000.- (dua miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah), meningkat dari tahun 2014 sebesar Rp. 1.019.650.000.- (satu miliar Sembilan belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan laporan perguliran dana UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Tompobulu untuk tahun 2015-2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2

Laporan Perguliran Dana UPK PNPM Mandiri Pedesaan
Kecamatan Tompobulu Tahun 2015-2018.

No	Tahun	Jumlah
1	2015	Rp 3,444,000,000
2	2016	Rp 3,494,000,000
3	2017	Rp 3,634,000,000
4	2018	Rp 3,678,000,000

Sumber: Laporan Keuangan UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Tompobulu.

Dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa perguliran dana simpan pinjam UPK PMPN Mandiri Pedesaan Kecamatan Tompobulu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dari tahun 2015-2016 mengalami peningkatan sekitar Rp. 50.000.000.- atau sekitar 1.45%, kemudian dari tahun 2016-2017 mengalami peningkatan lagi sebesar hampir 3 kali lipat dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp. 140.000.000 atau 4% dari tahun 2016. Pada tahun 2018 kembali mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, meskipun peningkatan ini tidak sebesar peningkatan yang terjadi pada tahun 2017. Peningkatan yang terjadi pada tahun 2018 hanya sebesar Rp. 44.000.000.- atau sebesar 1.21% dari tahun 2017. Meskipun peningkatan setiap tahunnya tidak terlalu besar, tetapi ini menunjukkan kekonsistenan UPK PNPM Mandiri Pedesaan dalam membantu perekonomian masyarakat khususnya dalam memberikan bantuan pinjaman pada pelaku usaha kecil mikro. Dengan meningkatnya pula dana UPK PNPM Mandiri Kecamatan Tompobulu, maka modal yang akan diberikan semakin bertambah sehingga dapat memperbesar *output*.

Dari tabel di atas pula, dapat kita lihat bahwa dana yang digulirkan setiap tahunnya lebih besar dari total dana yang dimiliki UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Tompobulu. Ini menunjukkan bahwa perguliran yang terjadi cukup lancar dikarenakan setiap ada dana yang masuk maka akan digulirkan kembali ke masyarakat. Hal ini sejalan dengan yang diutarakan oleh sekretaris UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Tompobulu dalam wawancaranya.⁶⁵

UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Tompobulu ini bisa dibilang sangat berperan bagi peningkatan ekonomi masyarakat, ini terbukti dari kepercayaan masyarakat terhadap kami (UPK PNPM Mandiri Pedesaan)

⁶⁵HaedarAk., (Sekretaris UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Tompobulu), Wawancara pada tanggal 10 Oktober 2019.

dalam hal bantuan modal. Sejak awal adanya PNPM Mandiri Pedesaan, sampai dananya dikelola UPK PNPM Mandiri Pedesaan, bahkan sampai sekarang permintaan bantuan modal terus bertambah. Dapat dilihat dari bertumpuknya proposal permintaan bantuan, sehingga dana yang masuk atau kembali akan langsung kami gulirkan lagi untuk kelompok lain.

Dari hasil wawancara di atas, dapat dilihat bahwa UPK PNPM Mandiri sejauh ini telah berusaha untuk mengelola keuangan, memastikan perguliran dana simpan pinjam berjalan lancar dan merata kepada masyarakat golongan menengah kebawah. Perguliran terus dilakukan dan tidak membiarkan dana hanya tersimpan begitu saja tanpa dipergunakan agar tujuan UPK PNPM Mandiri Pedesaan sebagai lembaga yang membantu pemerataan kesejahteraan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah pedesaan dapat terealisasi.

2. Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk dan hal-hal yang berhubungan dengan kenaikan jumlah angka kerja (*laborForce*) secara tradisional dianggap sebagai faktor positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Artinya semakin banyak angkatan kerja berarti semakin banyak faktor produksi tenaga kerja, sedangkan semakin banyak penduduk akan meningkatkan potensi pasar domestik. Pertumbuhan penduduk dalam faktor ekonomi tidak hanya diartikan dengan bertambahnya jumlah penduduk, tetapi juga angkatan kerja dan peluang kerja yang semakin meningkat. Peningkatan angkatan kerja yang didukung adanya modal maka dapat meningkatkan perekonomian. Jika dengan adanya modal maka lapangan pekerjaan baru akan terbuka sehingga akan terjadi peningkatan ekonomi.

Dalam UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Tompobulu, selain dari jumlah anggaran yang meningkat setiap tahunnya, jumlah penerima pinjaman juga

terus meningkat setiap tahunnya, dengan demikian maka akan terbuka pula peluang kerja baru untuk mengimbangi pertumbuhan penduduk di Kecamatan Tompobulu serta meningkatkan ekonomi . Berikut perkembangan jumlah anggota penerima pinjaman UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Tompobulu tahun 2015-2018.

Tabel 4.3
Peningkatan Jumlah Anggota UPK PNPM Mandiri Pedesaan
Kecamatan Tompobulu Tahun 2015-2018

NO	Tahun	Jumlah Anggota		Jumlah
		Anggota lama	Anggota Baru	
1	2015	860	54	914
2	2016	898	47	945
3	2017	926	166	1092
4	2018	915	203	1118

Sumber: Laporan Keuangan UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Tompobulu.

Tabel di atas menunjukkan bahwa peningkatan anggota Simpan Pinjam Perempuan UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Tompobulu cukup konsisten dan terus mengalami peningkatan, meskipun peningkatan yang terjadi tidak cukup besar tetapi ini menunjukkan bahwa yang menerima dampak dari adanya UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Tompobulu terus meningkat.

3. Kemajuan Teknologi

Kemajuan teknologi merupakan faktor yang paling penting bagi pertumbuhan ekonomi. Dalam bentuknya yang paling sederhana, kemajuan teknologi disebabkan oleh cara-cara baru dan cara-cara lama yang diperbaiki dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan. Dalam UPK PNPM Mandiri Pedesaan, perkembangan teknologi yang digunakan belum begitu signifikan. Hanya beberapa prosedur yang mulai menggunakan teknologi seperti pencatatan laporan keuangan, yang tidak lagi dilakukan dengan manual.

E. Karakteristik Pertumbuhan Ekonomi Islam Melalui UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Tompobulu

PNPM Mandiri Pedesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan di wilayah pedesaan.⁶⁶ PNPM Mandiri Pedesaan ini merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah pedesaan.

Dalam hal ini peneliti mengamati dari hasil wawancara bersama UPK PNPM Mandiri Kecamatan Tompobulu dan anggota kelompok simpan pinjam perempuan, maka UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Tompobulu dapat diuraikan ke dalam beberapa karakteristik pertumbuhan ekonomi dalam Islam, sebagai berikut:

1. Serba Meliputi

Islam memandang bahwa pertumbuhan lebih Dari sekedar materi dan memiliki tujuan yang lebih universal dibandingkan orientasi terbatas yang ingin dicapai oleh sistem-sistem kontemporer yaitu keadilan sosial. Sebagaimana dalam pandangan Islam, UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Tompobulu hadir tidak hanya sekedar memberikan bantuan secara materi, tetapi juga mengupayakan agar tercipta masyarakat yang sempurna, berupaya meningkatkan perekonomian keluarga, sehingga dalam lingkungan bermasyarakat tidak lagi ada perbedaan status sosial.

2. Berimbang

Pertumbuhan ekonomi Islam bukan hanya berorientasi untuk menciptakan pertambahan produksi, tetapi juga ditujukan berlandaskan keadilan distribusi. Keadilan dilakukan dengan melakukan kebaikan kepada semua manusia dalam

⁶⁶Petunjuk Teknik Operasional PNPM Mandiri Pedesaan, h. 2.

kondisi apapun. Berimbang yang dimaksudkan di mana terjadi pertambahan produksi dan keadilan dalam distribusi untuk mencapai tujuan ekonomi dalam Islam yaitu memberikan kesempatan bagi semua masyarakat untuk mendapatkan kecukupan bukan kekurangan. Sejalan dengan Islam, UPK PNPM Mandiri Pedesaan juga mengupayakan agar masyarakat dapat meningkatkan produksi dan pemerataan distribusi agar masyarakat dapat merasakan kesejahteraan dan mendapat kesempatan yang sama.

3. Realistis

Realistis merupakan suatu pandangan terhadap permasalahan yang sesuai dengan kenyataan. Islam memandang persoalan ekonomi dan sosial yang mungkin terjadi di masyarakat dan memberikan solusi yang realistis pula. UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Tompobulu dipandang realistis dalam pemberian dana pinjaman modal karena sebelum memberi pinjaman, UPK PNPM Mandiri terlebih dahulu terjun ke lapangan untuk melihat kondisi di masyarakat sebelum memutuskan berapa pinjaman modal yang akan diberikan. Seperti yang disampaikan oleh sekretaris UPK PNPM Mandiri Kecamatan Tompobulu pada wawancaranya.⁶⁷

“Sebelum memberi modal, tim verifikasi kami turun dulu ke lapangan untuk melihat bahwa anggota ini memang membutuhkan pinjaman sesuai yang di ajukan pada proposalnya atau tidak, diperhatikan pula apakah anggota ini akan siap mengembalikan pinjaman tepat waktu atau tidak.”

4. Keadilan

Allah selalu memerintahkan kita untuk berbuat adil dalam banyak hal, sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nahl/16 ayat 90:

⁶⁷Haedar AK., (Sekretaris UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa), Wawancara pada 10 Oktober 2019.



Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”⁶⁸

Dalam programnya, UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Tompobulu tidak membedakan pelayanan pada tiap-tiap anggota kelompoknya. Tiap anggota kelompok diberikan modal sesuai dengan kebutuhannya, kebijakan yang diberikan bagi tiap anggota kelompok juga sama. Sebagaimana yang disampaikan oleh ketua UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Tompobulu.⁶⁹

“Semua yang kami beri modal adalah keluarga bagi kami, jadi kami tidak membedakan dari segi pelayanan, kami juga tidak membedakan dalam memberi bantuan, kita berikan mereka modal sesuai kebutuhan masing-masing. Semua anggota kita sudah anggap sebagai keluarga besar UPK PNPM Mandiri Kecamatan Tompobulu, tidak boleh kita bedakan dan harus kita tetap berlaku adil”

5. Bertanggung Jawab

Dalam syariat Islam, tanggung jawab di simpulkan dalam dua sisi, yaitu:

⁶⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Lembaga Percetakan Al-Qur'an Raja Fahd), h. 415.

⁶⁹Drs. H. Abdul Karim HI, (Ketua UPK PNPM Mandiri Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa), *Wawancara*, pada tanggal 10 Oktober 2019.

- a. Tanggung jawab negara terhadap rakyatnya. Dalam hal ini, pemerintah mencanankan PNPM Mandiri Pedesaan sebagai bentuk tanggung jawab dan upaya negara untuk pemeratakan dan meningkatkan perekonomian rakyatnya.
- b. Tanggung jawab antar sebagian masyarakat terhadap sebagian lainnya. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa tiap-tiap anggota kelompok simpan pinjam harus bertanggung jawab atas kewajibannya kepada UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Tompobulu, sebagaimana UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Tompobulu telah memberikan hak masyarakat.

6. Mencukupi

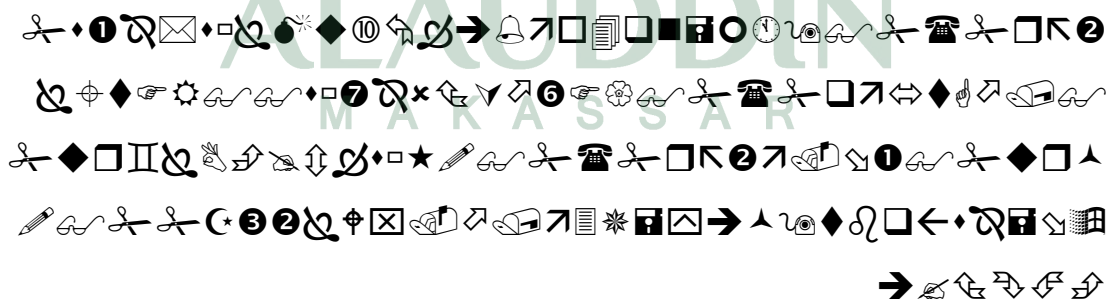
Islam tidak hanya menetapkan adanya karakteristik tanggung jawab, namun tanggung jawab itu harus ada mutlak dan mampu mencakup realisasi kecukupan bagi semua manusia. Oleh karena itu, UPK PNPM Mandiri Kecamatan Tompobulu merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mencukupi kebutuhan masyarakat dengan menjadikan masyarakat lebih mandiri melalui sektor usaha mikro, dan sebaliknya masyarakat juga harus menunaikan tanggung jawabnya kepada UPK PNPM Mandiri Pedesaan yang telah memenuhi hak masyarakat.

7. Berfokus pada Manusia

Fokus pertumbuhan ekonomi Islam tidak lain adalah manusia itu sendiri agar tidak diperbudak materi seperti kaum kapitalis, dan menjadi hina karena tidak memiliki kebebasan sebagaimana dalam ekonomi sosial. Dalam UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Tompobulu memprioritaskan pemenuhan kebutuhan secara umum untuk mengentaskan kemiskinan dengan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat dengan mendayagunakan secara optimal sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan guna untuk bertahan hidup. Semua kegiatan yang dilakukan

F. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Peran UPK PNPM Mandiri Pedesaan dalam Upaya Peningkatan Ekonomi di Kecamatan Tompobulu

Islam juga sangat menganjurkan supaya kita senantiasa untuk berusaha dan bekerja untuk mendapatkan rezeki dari Allah AWT. karena rezeki itu tidak akan turun dengan sendirinya tanpa ada usaha kita untuk mendapatkannya. Ajaran agama kita yang mulia ini juga telah mengajarkan bahwa Allah SWT. tidak akan mungkin merubah nasib suatu kaum atau masyarakat, hingga kaum atau masyarakat itu sendiri yang berusaha untuk merubahnya. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah surah Al-Jumu'ah/62 ayat 10 yang berbunyi:

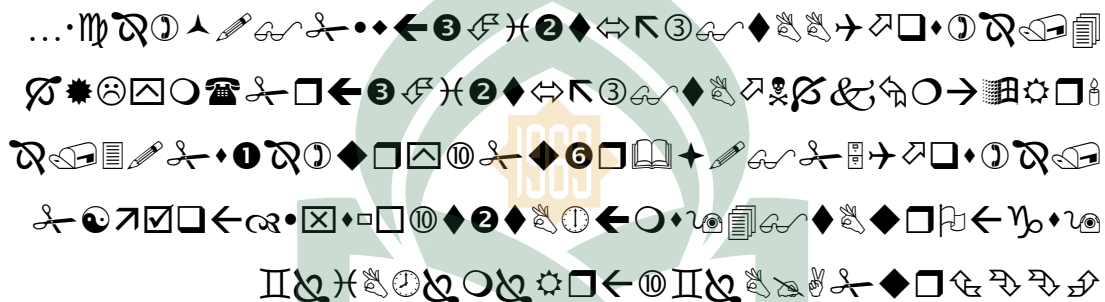


Terjemahnya:

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”⁷⁰

Pada ayat di atas, Allah memerintahkan kita untuk mencari rezeki yang halal setelah menunaikan shalat, manusia juga dianjurkan untuk selalu mengingat kepada Allah dalam setiap aktivitasnya agar mendapat keberuntungan di dunia dan di akhirat.

Dan firman Allah SWT. dalam potongan surah Ar-Ra'd/13 ayat 11 yang berbunyi:



Terjemahnya:

“...Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.”⁷¹

Pada potongan ayat di atas dijelaskan bahwa nasib setiap manusia ditentukan oleh dirinya sendiri. Seseorang yang baik akan mendapatkan berkah dari Allah SWT., dan sebaliknya manusia yang menyimpang dari ajaran Agama akan mendapat murka dari Allah SWT.

⁷⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Lembaga Percetakan Al-Qur'an Raja Fahd), h. 933.

⁷¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Lembaga Percetakan Al-Qur'an Raja Fahd), h. 370.

Sebagaimana dalam QS. Al-Mudatsir/74 ayat 42-47, Allah Berfirman:

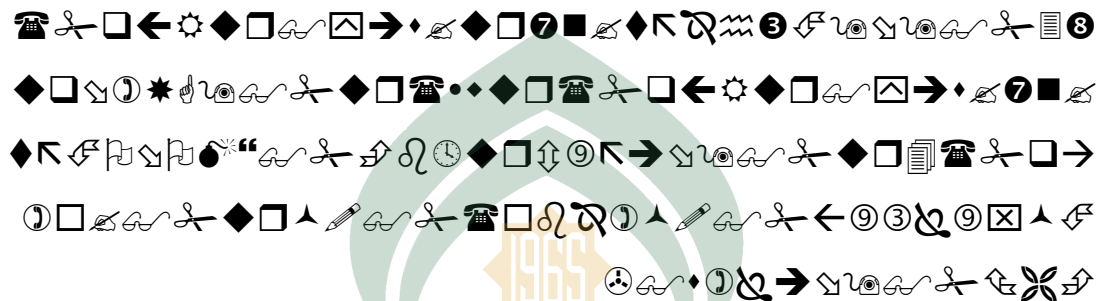
Terjemahnya:

Dari ayat di atas mengemukakan bahwa sebab-sebab dicampakkannya segolongan manusia ke dalam neraka dihari kemudian kelak. Salah satu dari sebab-sebab mereka tidak memberi makan kepada orang miskin atau tidak peduli terhadap

⁷²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Lembaga Percetakan Al-Qur'an Raja Fahd), h. 995.

penderitaan yang dialami oleh orang yang hidupnya kekurangan. Hal ini memberikan petunjuk bahwa memberikan bantuan kepada orang miskin atau kepedulian terhadap nasib orang yang kurang mampu merupakan salah satu dari perintah agama. Dan sebagaimana dijelaskan dalam potongan ayat QS. Al-Maidah/5 ayat 2.

...



Terjemahnya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”⁷³

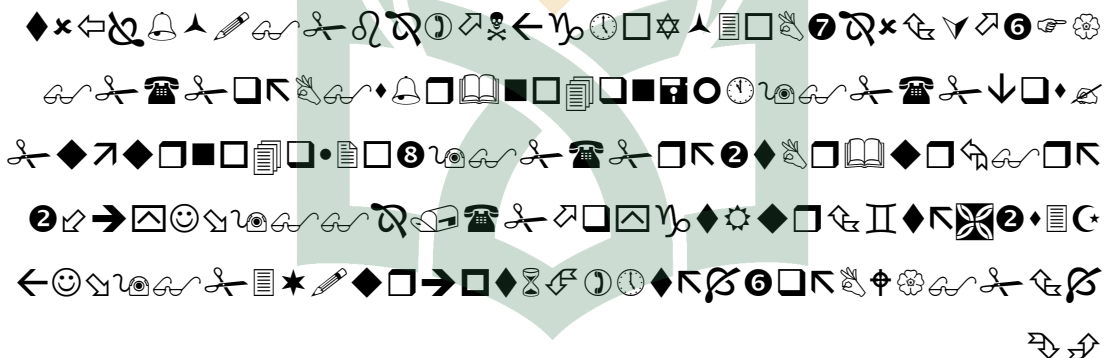
Dari uraian di atas, Islam memperhatikan dan mempertimbangkan sifat tolong-menolong, dan menganjurkan untuk saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan serta tolong menolong di jalan Allah. Berikut tinjauan ekonomi Islam terhadap peran UPK PNPM Mandiri Pedesaan terhadap peningkatan ekonomi di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa.

1. Peran Pemerintah Dalam Islam

⁷³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Lembaga Percetakan Al-Qur'an Raja Fahd), h. 156.

Peran pemerintah dalam Islam yaitu diamanahi untuk menjamin bahwa keadilan berlangsung disemua bidang kehidupan, hal ini dilakukan negara dengan memikul tanggung jawab sebagai wali atau penyedia kesejahteraan masyarakat. Pentingnya peran pemerintah atau pemimpin sebagai khalifah di muka bumi dalam hal ini adalah peran pemerintah pusat maupun daerah.

Allah telah memerintahkan manusia untuk menegakkan keadilan dan berbuat ihsan, dan ia telah membuat hal tersebut menjadi wajib atas setiap individu muslim dan organisasi termasuk pemerintah Islam. Tidak ada pemerintah Muslim yang dapat menghindar dari melaksanakan tugas dan kewajiban ini. Allah SWT. telah menjelaskan dengan jelas peran pemerintah dalam QS.Al-Hajj/22 ayat 41.



Terjemahnya:

“(yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma’ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.”⁷⁴

⁷⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 518.

Dalam ayat ini, Allah telah memanggil atas orang muslim untuk melakukan ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Agar berdiri pemerintah ekonomi yang adil, kita harus memperkuat ma'ruf dan mencegah mungkar. Kata-kata ini memiliki makna yang komprehensif dan luas meliputi moral, sosial, ekonomi dan seluruh bidang. Implikasi yang benar dalam menerapkan prinsip al-ma'ruf dalam bidang ekonomi berarti membangun sebuah ekonomi berkeadilan dan mencegah yang mungkar akan menjamin tertutupnya semua jalan dan tempat yang mengarah pada penindasan ekonomi.

Sebuah negara yang baik tentu memiliki kebijakan serta program yang baik menanggulangi kemiskinan, keseriusan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan memulai PNPM Mandiri Pedesaan dengan memberdayakan masyarakat miskin dan memberikan kemudahan layanan pinjaman modal yang diharapkan masyarakat miskin mampu membuka dan mengembangkan usaha untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin dalam menanggulangi kemiskinan. Meskipun PNPM Mandiri Pedesaan telah berakhir sejak tahun 2014, tetapi aset simpan pinjamnya di Kecamatan Tompobulu masih aktif dikelola oleh UPK PNPM Mandiri Pedesaan sampai sekarang.

2. Mekanisme Simpan Pinjam UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Tompobulu dalam Panjangan Islam.

Pada dasarnya tujuan dan maksud diberikannya pinjaman PNPM Mandiri Pedesaan adalah untuk menanggulangi kemiskinan dengan menumbuhkan dan mengembangkan usaha masyarakat miskin.

Berdasarkan hasil wawancara menyatakan bahwa dengan adanya pinjaman dari UPK PNPM Mandiri Pedesaan sebagian masyarakat Kecamatan Tompobulu terbantu dalam meningkatkan pendapatan. Sehingga dengan meningkatnya pendapatan, meningkat pula perekonomiannya dan pada akhirnya masyarakat Kecamatan Tompobulu mampu melepaskan diri dari kemiskinan.

Sebagaimana firman Allah SWT. dalam QS Al-Baqarah/2 ayat 145.



Terjemahnya:

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”⁷⁵

Berdasarkan ayat di atas dapat dijelaskan bahwa memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan termasuk akhlak yang mulia dan terpuji, Karena berarti menolong orang lain untuk melepaskan kesusahannya. Serta memberikan pinjaman yang baik yaitu pinjaman yang dipergunakan di jalan kebaikan.

Pada hakekatnya dalam melakukan kebaikan, kita hanya mengharap balasan dari Allah semata, tidak bertujuan untuk keuntungan komersial. Logisnya dari segi tujuan dan maksud, pinjaman UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Tompobulu

⁷⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Lembaga Percetakan Al-Qur'an Raja Fahd), h. 37.

terbilang sangat membantu dengan alasan untuk membantu masyarakat dalam membuka dan mengembangkan usahanya. Namun mekanisme simpan pinjam UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Tompobulu mengandung riba karena terdapat tambahan yang ditetapkan di awal.

Riba adalah penetapan bunga atau melebihi jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan presentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Menurut wawancara dengan bapak Dr. Ir. Idris Parakassi, M.M. selaku dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Uin Alauddin Makassar, ia menyatakan bahwa:⁷⁶

“Dalam transaksi simpan pinjam tidak boleh mensyaratkan adanya tambahan baik presentase dari nilai pinjaman maupun nominal yang ditentukan dari pokok, karena masuk kategori riba. Karena dalam setiap simpan pinjam yang mensyaratkan adanya tambahan itu adalah riba.”

Larangan riba ini dijelaskan Allah SWT. dalam QS. Al-Baqarah/2 ayat 278.



Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.”⁷⁷

⁷⁶Dr. Ir. Idris Parakassi, M.M., (Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar), *Wawancara* pada tanggal 23 Oktober 2019.

⁷⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Lembaga Percetakan Al-Qur'an Raja Fahd), h. 69.

Dalam ayat ini berisi perintah Allah SWT kepada orang-orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah SWT dan meninggalkan riba. Yang artinya Allah SWT. secara tegas menyatakan keharaman riba. Allah mengharamkan riba karena bisa memutuskan tali silaturahmi antara peminjam dan yang memberi pinjaman. Selain itu, Allah juga mengharamkan riba dalam pinjaman karena tambahan yang diberikan kepada peminjam akan memberatkan orang yang meminjam.

Menurut salah satu anggota penerima pinjaman UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Tompobulu, ia merasa terbantu dan tidak merasa terbebani dan justru merasa terbantu oleh jasa pinjaman yang diberikan oleh UPK PNPM Mandiri Kecamatan Tompobulu. Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Reski Ariati dalam wawancaranya.⁷⁸

“Saya tidak merasa terbebani dengan jasa 1.17% yang diberikan oleh UPK PNPM Mandiri Kecamatan Tompobulu, justru saya merasa terbantu dengan adanya pinjaman ini, jasa yang ditawarkan cukup ringan sehingga saya bisa terus mengembangkan usaha tanpa dibebani bunga yang tinggi.”

Berbeda dengan pendapat ibu Reski Ariati, bapak Dr. Ir. Idris Parakassi menyampaikan pendapat lain mengenai simpan pinjam ini.⁷⁹

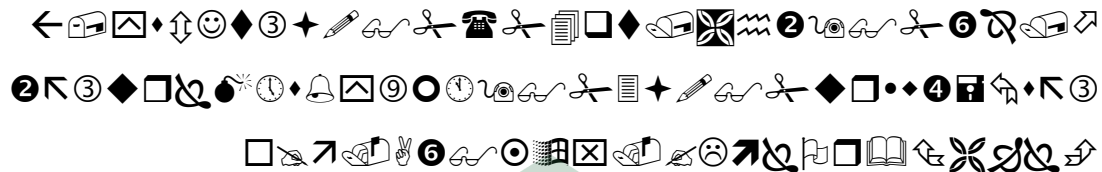
“Dalam Islam, untuk mencapai kemaslahatan tidak boleh dengan menghalalkan segala macam cara, dalam Islam meskipun tujuannya baik tetapi caranya salah maka tetap akan dilarang. Meskipun memberikan kemaslahatan, tetapi mekanisme yang termasuk riba tetap diharamkan dalam Islam.”

Meskipun masyarakat tidak merasa terbebani dengan jasa yang dipersyaratkan ini dan justru merasa terbantu, tetapi kemaslahatan ini tetap tidak dapat dijadikan

⁷⁸Reski Ariati, (Anggota Kelompok UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa), *Wawancara* pada tanggal 14 Oktober 2019.

⁷⁹Dr. Ir. Idris Parakassi, M.M., (Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar), *Wawancara* pada tanggal 23 Oktober 2019.

alasan untuk membolehkan adanya tambahan dalam hutang piutang, karena Allah SWT. telah dengan tegas melarang riba dalam Al-Qu'ran. Sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah/2 ayat 276.



Terjemahnya:

“Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.”⁸⁰

Dalam ayat tersebut yang dimaksud dengan memusnahkan Riba ialah memusnahkan harta itu atau meniadakan berkahnya. Sedangkan yang dimaksud dengan menyuburkan sedekah ialah memperkembangkan harta yang telah dikeluarkan sedekahnya atau melipat gandakan berkahnya. Dan Allah membenci setiap orang-orang yang menghalalkan Riba dan tetap melakukannya, dengan demikian Allah memerintahkan kita untuk meninggalkan riba dan mencari harta dengan cara yang dianjurkan Allah.

Dengan demikian, meskipun tujuan dari adanya UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Tompobulu ini mulia karena ingin membantu perekonomian masyarakat dengan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pemberian pinjaman modal untuk membuka dan mengembangkan usaha mikro, tetapi menurut pandangan Islam mekanisme yang digunakan haram karena mengandung unsur riba.

⁸⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Lembaga Percetakan Al-Qur'an Raja Fahd), h. 69.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa berperan terhadap peningkatan ekonomi di Kecamatan Tompobulu. Ini dapat dilihat dari modal pinjaman yang diberikan oleh UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Tompobulu dapat membantu masyarakat dalam membuka dan mengembangkan usaha mikro sehingga masyarakat lebih produktif dan dapat meningkatkan pendapatannya.
2. Adapun faktor-faktor yang menjadi kendala UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Tompobulu dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan dana dari program Simpan Pinjam UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Tompobulu, kurangnya kesadaran anggota kelompok simpan pinjam untuk mengembalikan dana tepat waktu dan waktu pencairan sering mengalami keterlambatan.
3. Tinjauan ekonomi Islam terhadap adanya UPK PNPM Mandiri Pedesaan dalam peningkatan ekonomi Islam di Kecamatan Tompobulu, khususnya pada program simpan pinjam ini adalah baik, karena di dalam pemberian pinjaman terdapat unsur tolong menolong antara pemberi pinjaman dan pihak yang meminjam dana. Tetapi meskipun masyarakat merasa terbantu dengan adanya

pinjaman ini, mekanisme simpan pinjam ini tetap mengandung riba, karena pengembaliannya terdapat jasa sebesar 1.17% perbulan dari pinjaman pokok.

B. Saran

Dengan adanya UPK PNPM Mandiri Pedesaan ini yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam peningkatan ekonomi masyarakat di Kecamatan Tompobulu, maka setelah penulis melakukan penelitian ada beberapa rekomendasi yang penulis sarankan, yang bersifat konstruktif sebagai acuan bagi UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Tompobulu agar kedepannya diharapkan UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Tompobulu lebih dapat berperan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat pedesaan serta lebih optimal lagi dalam meningkatkan ekonomi di Kecamatan Tompobulu, seperti:

1. Bagi anggota simpan pinjam hendaknya lebih ditingkatkan kesadaran akan pengembailan pinjaman dan pemberdayaan diri apalagi dengan adanya program simpan pinjam memudahkan kita untuk berdaya dan diberdayakan.
2. Agar kedepannya UPK PNPM Mandiri Kecamatan Tompobulu lebih optimal lagi dalam pengelolaan agar semakin banyak masyarakat yang menerima manfaat, serta lebih tepat waktu dalam pencairan dana pinjaman agar masyarakat dapat terus mengembangkan usahanya.
3. Untuk kedepannya, dana UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Tompobulu agar dikelola dengan menggunakan mekanisme syariah, karena keseluruhan UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Tompobulu dan anggota simpan pinjam merupakan muslim dan agar terhindar dari dosa riba.

C. Keterbatasan dan Hambatan dalam Penelitian

1. Hambatan dalam penelitian ini adalah sulitnya memperoleh informan dari Anggota UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Tompobulu karena jarak kantor UPK PNPM Mandiri yang rata-rata berjauhan dengan tempat tinggal anggota kelompok.
2. Sulitnya menemui informan dari tokoh ekonomi Islam dikarenakan kesibukannya dan tidak memiliki waktu senggang untuk melakukan wawancara.
3. Penulis kesulitan memahami jawaban dari informan karena penjelasannya kadang bertele-tele dan berulang-ulang, kadang informan juga hanya menjawab seperlunya.
4. Kurang lengkapnya data yang tersedia mengenai profil Kecamatan Tompobulu

DAFTAR PUSTAKA

- Apriliana, "Evaluasi Program nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan dan Perekonomian Masyarakat (Studi Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu" Skripsi, Bandar Lampung: Fak Ilmu Sosial dan Politik, 2017.
- Aresta, Febrilia Ika, "Peranan Bantuan Modal PNPM Mandiri Pedesaan (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan) Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Desa Banyuurip, Kecamatan Banyuurip, Kabupaten Purwarejo", Skripsi, Yogyakarta: Fak. Ekonomi, 2013.
- Arsyad, Licolin, *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Ed. 3, Cet. 1, Yogyakarta: BPFE, 2016.
- Bungin, M. Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran*, Ed. 1, Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2013.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Lembaga Percetakan Al-Qur'an Raja Fahd.
- Departemen Dalam Negeri Tahun 2008.
- Gamal, Marza, *Aktivitas Ekonomi Syariah*, Pekanbaru: Unri Press, 2004.
- Huda, Nurul, Dkk, *Ekonomi Pembangunan Islam*, Ed.1, Cet. 2, Jakarta: Kencana, 2017.
- Huraerah, Abu, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakatan*, Bandung: Humaniora, 2011.
- Indrianto, Nur dan Bambang Supomo, *Metodologi Penelitian Bisnis*, Yogyakarta: BPFE, 2010.
- Jima, "Analisis Program PNPM Mandiri Pedesaan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat", *DAYA SAING Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya*, Vol. 14, No. 2, 2013.
- Laporan Fasilitator Kecamatan PNPM Mandiri Pedesaan, Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa.
- Maipita, Indra, *Mengukur Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan*, Ed. 1, Yogyakarta: UUP STIM YKPN, 2014.
- Mannan, Muhammad Abdul, *Ekonomi Islam Teori dan Praktek Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993.
- Marsuki, *Analisis Perekonomian Nasional dan Internasional*, Ed. 2, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010.
- Moeliono, *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.

- Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Ed. 1, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, Ed. 1, .Cet. 1, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2011.
- Novitasari, Dian, “Analisis Program PNPM Mandiri Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Miskin di Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali Tahun 2009” Skripsi, Surakarta: Fak Ekonomi, 2011.
- Nurmantoro, Bogi, “Analisis Ekonomi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) Di Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar”, Skripsi, Surakarta: Fakulas Ekonomi, 2011.
- Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri.
- Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Pedesaan.
- Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Pedesaan, Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa.
- PNPM Mandiri, “Paket Informasi 2012-1013”.
- Pratama, Ari “Analisis Pemberdayaan Ekonomu Masyarakat Melalui UPK PNPM Mandiri dalam Mengurangi Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Aceh Besar (Studi Kasus: UPK PNPM Mandiri Kecamatan Baitussalam)”, Skripsi, Banda Aceh: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam, 2018.
- Profil Kecamatan Tompobulu Tahun 2018.
- Profil Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa.
- Purnamasari, Nur Inas, “Pengaruh Program Pemerintah PNPM Mandiri (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri) Terhadap Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat Di Desa Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur”, *EJournal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 3, No. 1, 2015.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2011.
- Putong, Iskandar, *Economics Pengantar mikro dan Makro*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2010.
- Sadeq, Abdul Hasan Muhammad, *Economic Development in Islam*, Malaysia: Pelanduk Publication, 1991.
- Sjafrizal, ”Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi”, Cet. 2, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Subandi, *Ekonomi Pembangunan*, Cet. 4, Bandung: Alfabeta, 2016, 87-89.
- Sudaryono, *Metode Penelitian*, Ed. 1, Cet. 1, Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, Cet. 9, Bandung: Alfabeta, 2017.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet. 27, Jakarta: Alfabeta, 2018.

Sulistiyan, Ambar Teguh, *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*, Yogyakarta: Gava Media, 2004.

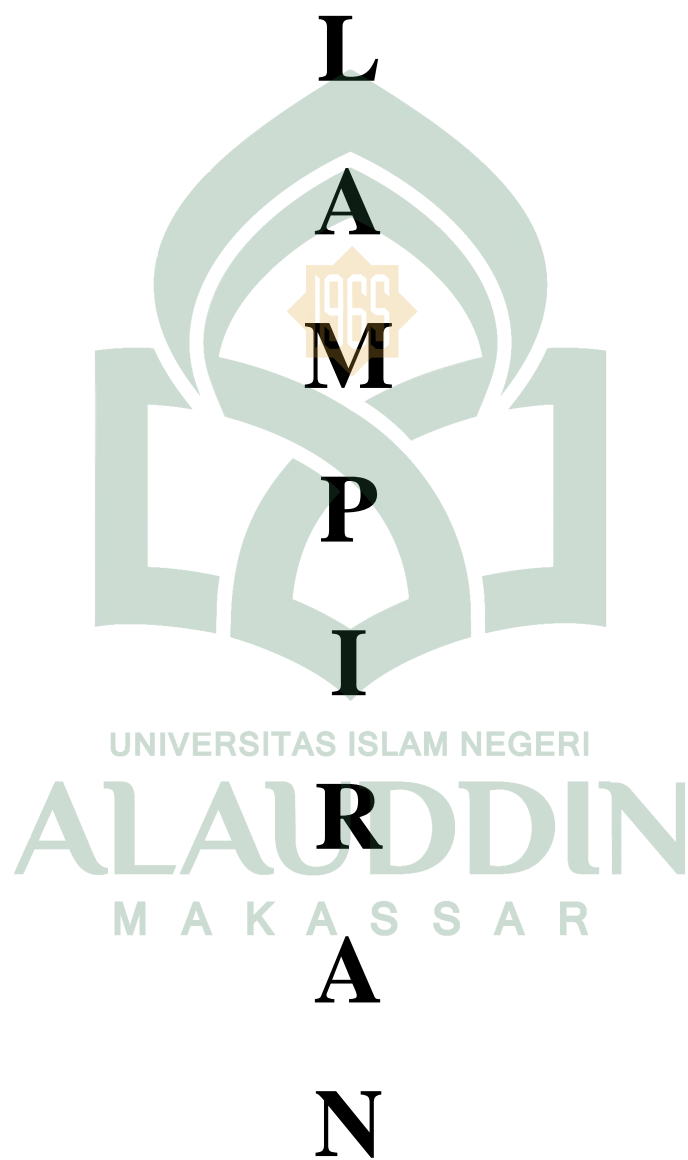
Tafsir Al-Mukhtashar/Markaz Tafsir Riyad di Bawah Pengawasan Syaikh Dr. Shalib Bin Abdullah Bin Humaid (Imam Masjidil Haram).

Wikipedia, “*PNPM Mandiri Pedesaan*”.

Yuliadi, Imamudin, *Ekonomi Islam*, Yogyakarta: LPPI, 2006.

Zakir, Muhammad, “Peran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kecamatan Bakinang Seberang Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam”, Skripsi, Riau: Fak. Syari’ah dan Hukum, 2011.





Lampiran I

Pedoman Wawancara

A. UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Tompobulu:

1. Bagaimana awal mula terbentuknya UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Tompobulu?
2. Menurut Bapak/Ibu bagaimana perkembangan UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Tompobulu?
3. Apa saja program-program yang telah dijalankan PNPM Mandiri Pedesaan?
4. Berapa banyak anggota Simpan Pinjam Perempuan?
5. Bagaimana prosedur keanggotaan Simpan Pinjam Perempuan?
6. Berapa batasan dana dan waktu pengembalian yang diberikan UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Tompobulu?
7. Kendala apa yang sering terjadi dalam pelaksanaan program UPK PNPM Mandiri Kecamatan Tompobulu?
8. Bagaimana UPK PNPM Mandiri Kecamatan Tompobulu mengatasi kendala yang terjadi?
9. Apa saja kontribusi yang telah dilakukan UPK PNPM Mandiri Pedesaan dalam peningkatan ekonomi masyarakat?

B. Anggota Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Kecamatan Tompobulu

1. Bagaimana pendapat ibu mengenai adanya UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Tompobulu?
2. Setujukah ibu dengan adanya program simpan pinjam perempuan?

3. Berapakah total pinjaman yang ibu terima dari dana bergulir UPK PNPM?
4. Dana bergulir dari UPK PNPM Mandiri Pedesaan bapak/ibu gunakan untuk apa?
5. Apakah kendala ibu dengan anggota kelompok lainnya?
6. Bagaimana dampak secara langsung yang ibu rasakan setelah adanya UPK PNPM Mandiri Pedesaan?
7. Apakah dalam melayani, UPK PNPM Mandiri bersikap ramah, sopan dan tidak memandang status sosial?

C. Tokoh Ekonomi Islam

1. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai adanya UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Tompobulu?
2. Bagaimana Islam memandang mekanisme simpan pinjam UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Tompobulu?
3. Bagaimana solusi yang Bapak/Ibu tawarkan agar UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Tompobulu lebih baik lagi kedepannya?

Lampiran II

Dokumentasi Wawancara Kepada Narasumber



Gambar 1: Kantor Camat Tompobulu Kabupaten Gowa



Gambar 2: Sekretariat UPK PNPM Mandiri Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa



Gambar 3: Wawancara dengan UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Tompobulu



Gambar 4: Wawancara dengan Anggota UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Tompobulu

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
M A K A S S A R



Gambar 5: Proses Pencairan dana UPK PNPM Mandiri Pedesaan oleh Bendahara dengan Kelompok SPP.



Gambar 6: Wawancara dengan Tokoh Ekonomi Islam.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

ALAUDDIN Kampus I : Jl. Slt. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864924 Fax 864923
Kampus II : Jl. H.M Yasin Linpo No. 36 Samata – Gowa Tlp. 424835 Fax 424836

Hal : Permohonan Judul Skripsi

Kepada Yth.
Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
UIN Alauddin Makassar
Di-
Gowa

Assalamu Alaikum Wr. Wb.
Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini:

Nama : SITI NURHALIZAH
NIM : 90100115084
Semester : VI (Enam)
Jurusan : Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dengan Ini Mengajukan Permohonan Judul Skripsi Sebagai Berikut :

1. Peran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat menurut Perspektif Ekonomi Islam.
(Studi kasus PMPN Mandiri Pedesaan Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa)
2. Dampak Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap Masyarakat Miskin ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam.
(Studi kasus Masyarakat Desa Garing, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa)
3. Strategi Toko Swalayan dalam Upaya Peningkatan Pelanggan ditinjau menurut Perspektif Ekonomi Islam.
(Studi kasus Toko Swalayan Shanur Putra Tunggal Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Demikianlah Permohonan Saya Ajukan, Atas Perhatian dan Persetujuan Bapak/Ibu Saya
Ucapkan Terima Kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Gowa, April 2018

Mengetahui,
Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam,

Pemohon,

[Signature]
Drs. Thamrin Logawali, MII
NIP : 19551024 19873 1 001

[Signature]
Siti Nurhalizah
NIM : 90100115084

Acc 23/4-2018
gantikan Simbol no 1/B
latar belakang ditulis up front
judul penditikan Alauddin



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

Nomor : 1015 Tahun 2019

T E N T A N G

**PEMBIMBING/PEMBANTU PEMBIMBING DALAM PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA
JURUSAN EKONOMI ISLAM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar setelah :

- Membaca** : Surat Permohonan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, **SITI NURHALIZAH**, Nim:90100115084 tertanggal 24 April 2019 untuk mendapatkan Pembimbing Skripsi dengan Judul: "PERAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PEDESAAN DALAM PENINGKATAN EKONOMI MASYARAKAT MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS PNPM MANDIRI PEDESAAN KECAMATAN TOMPOBULU, KABUPATEN GOWA)"
- Menimbang** : a. Bahwa untuk membantu penelitian dan penyusunan skripsi mahasiswa tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan pembimbing/ pembantu pembimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas.
- b. Bahwa mereka yang ditetapkan dalam surat keputusan dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai pembimbing/pembantu pembimbing menyusun skripsi mahasiswa tersebut diatas
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
4. Keputusan Presiden RI Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status Institute Agama Islam Negeri Alauddin Makassar menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama.
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 25 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 85 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar.
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

- Pertama** : Mengangkat / Menunjuk Saudara :
1. Prof.Dr.H.Muslimin Kara, M.Ag
2. Dra. Hj. Nurani Gani, M.Ag
- Kedua** : Tugas Pembimbing/ Pembantu Pembimbing dalam Penelitian dan Penyusunan Skripsi Mahasiswa adalah memeriksa draft skripsi dan naskah skripsi, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan kemampuan menguasai masalah.
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran belanja Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kelima** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab



Ditetapkan di : Samata-Gowa
Pada tanggal : 10 Juli 2019

Dekan,

PROF. DR. H. AMBO ASSE, M.Ag
NIP. 19581022 198703 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kampus I : Jl. Sit. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864928 Fax 864923
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata – Gowa Tlp. 841879 Fax 8221400

Nomor : 560 / EB.I/PP.00.9/8/2019
Lampiran : -
Hal : **Undangan Seminar Proposal**
A.n. Sitti Nurhalla Zah/90100115084

Samata, 17 September 2019

Kepada Yth,
Bapak/Ibu Penguji dan Pembimbing
Di
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat kami mengundang Bapak/Ibu Penguji dan Pembimbing, untuk menghadiri dan melaksanakan serta bertindak selaku pembimbing dan penguji pada Seminar Draft Skripsi, yang insya Allah akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 20 September 2019
Waktu : 08.30 -12.00 WITA
Judul Skripsi : Peran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan dalam Peningkatan Ekonomi di Kecamatan Tompo Bulu Kabupaten Gowa (Ditinjau dalam Perspektif Islam)
Tempat : Ruang Seminar

Atas segala perhatian dan kehadirannya diucapkan banyak terima kasih.

Wassalam,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.

NIP. 19661301993031003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

Catatan:

1. SK Pembimbing Draft Skripsi Terlampir
2. Pembimbing diharapkan hadir



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR: 1809 TAHUN 2019**

TENTANG

**PANITIA DAN TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA
A.n. Siti Nurhalizah, NIM: 90100115084
JURUSAN EKONOMI ISLAM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca :** Surat Permohonan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, Nama **Siti Nurhalizah**, NIM: **90100115084** tertanggal 09 Agustus 2019 untuk melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan Judul: **"Peran Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan dalam Peningkatan Ekonomi di Kecamatan Tompo Bulu Kabupaten Gowa (Ditinjau dalam Perspektif Islam)"**.
- Menimbang :**
- a. Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran seminar proposal penelitian, perlu dibentuk panitia dan tim penguji seminar proposal penelitian dan penyusunan skripsi
 - b. Bahwa mereka yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai pembimbing dan penguji penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas.
 - c. Pembimbing dan penguji penyusunan skripsi mahasiswa tersebut diatas.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
 - 5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
 - 6. Peraturan Menteri Agama RI No. 25 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama RI No. 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
 - 7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- 1. Membentuk Panitia dan Tim Penguji Seminar Proposal penelitian dan penyusunan skripsi Jurusan **EKONOMI ISLAM** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar dengan komposisi:
 - Ketua : Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M. Ag.
 - Sekretaris : Dr. Hj. Rahmawati Muin, S. Ag., M. Ag.
 - Pembimbing I : Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M. Ag.
 - Pembimbing II : Dra. Hj. Nuzanti Gan, M. M.
 - Penguji I : Dr. Amiruddin K. M. El.
 - Penguji II : Muh. Akil Rahman, SE., ME.
 - Pelaksana : Isna Kumalasari, S. Ag., M. Pd.
 - 2. Panitia bertugas melaksanakan seminar proposal skripsi, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan dan kemampuan menguasai masalah penyusunan skripsi
 - 3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya
 - 4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di : Samata-Gowa
Pada tanggal : 16 September 2019



Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M. Ag.
NIP. 19641130 199303 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Kampus I : Jl. Sultan Alauddin No. 63 Makassar (0411) 864928 Fax 864923
Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa – Gowa Tlp. 841879 Fax 8221400

Nomor : 4728 /EB.I/PP.00.9/10/2019
Sifat : Penting
Lampiran: -
Perihal : *Permohonan Izin Penelitian*

Gowa, 3 Oktober 2019

Kepada,
Yth. UPT P2T BKPMID
Di,-

Tempat

Assalamu Alaikum Warohmatullah Wabarokatuh.

Dengan hormat disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar yang tersebut namanya dibawah ini:

Nama : Siti Nurhalizah
NIM : 90100115084
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Islam
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : Jl. Masjid Nurul Qamar III, Gowa

Bermaksud melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana. Adapun judul skripsinya:

"Peran Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) mandiri Pedesaan dalam Peningkatan Ekonomi di Kecamatan Toppobulu Kabupaten Gowa (Ditinjau dalam Perspektif Islam)"

Dengan Dosen pembimbing:

1. Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag.
2. Dra. Hj. Nuracni Gani, MM

Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberi izin melakukan penelitian di UPK PNPM Mandiri Pedesaan Kecamatan Toppobulu Kab. Gowa. Demikian harapan kami dan Terima Kasih.

Wassalam

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Alauddin Makassar,

Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.
NIP. 19661130 199303 1 003

Tembusan :

1. Rektor UIN Alauddin Makassar di Samata Gowa
2. Mahasiswa yang bersangkutan
3. Arsip



120191914214308

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 23883/S.01/PTSP/2019
 Lampiran :
 Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
 Bupati Gowa

di-
 Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar Nomor : 4728/EB.IPP.00.0/10/2019 tanggal 03 Oktober 2019 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **SITI NURHALIZAH**
 Nomor Pokok : 90100115084
 Program Studi : Ekonomi Islam
 Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
 Alamat : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Samata Gowa

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" PERAN UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) PROGRAM NASIOAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PEDESAAN DALAM PENINGKATAN EKONOMI DI KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN GOWA (DITINJAU DALAM PERSPEKTIF ISLAM) "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 07 Oktober s/d 07 November 2019

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diberikan di Makassar
 Pada tanggal : 03 Oktober 2019

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
 Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

ALA UDDIN
M A K A S S A R
A. M. YAMIN, SE., MS.
 Pangkat : Pembina Utama Madya
 Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth
 1. Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar di Makassar,
 2. Bertinggal.

SIMAP PTSP 03-10-2019



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231



Jln. Mesjid Raya No. 30. Telepon. 884637. Sungguminasa - Gowa

Kepada

Nomor: 070/ 199/BKB.P/2019

Lan.p : -

Perihal : *Rekomendasi Penelitian*

Di-

Tempat

Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel
 Nomor: 23883/S.01/PTSP/2019 tanggal 03 Oktober 2019 tentang Rekomendasi Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Dengan ini disampaikan kepada saudara/saudari sebagai berikut:

Nama	: SITI NURHALIZAH
Tempat/Tanggal Lahir	: Garing, 17 Oktober 1997
Jenis kelamin	: Perempuan
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Masjid Nurul Qamar III Paccinongan

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul **"PERAN UNIT PENGELOLA KEGIATAN (UPK) PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MSAYRAKAT (PNPM) MANDIRI PENDESAAN DALAM PENINGKATAN EKONOMI DI KECAMATAN TOMPOBULU KABUPATEN GOWA (DITINJAU DALAM PERSPEKTIF ISLAM) "**

Selama	: 07 Oktober s/d 07 November 2019
Pengikut	: Tidak Ada

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Gowa.
2. Penelitian/Pengambilan Data tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) Eksemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Gowa Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Gowa.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.

AB. BUPATI GOWA
KEPALA BADAN.

DRS. BAHARUDDIN.T

Pangkat Pembina Utama Muda
NIP. : 19600124 197911 1 001

Tembusan :

1. Bupati Gowa (sebagai laporan);
2. Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis UIN Alauddin Makassar di Makassar;
4. Yang bersangkutan;
5. Peringgal,-



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
KECAMATAN TOMPOBULU**

Jalan Masjid Raya Nomor 133 Malakaji Telepon (0419) 23100

Malakaji, 9 Oktober 2019

Nomor : 070/KTB/ 169/X/2019
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada
Yth, Ketua UPK PNPM Kec Tompobulu

Di-
Malakaji

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kab Gowa Nomor : 070/990/BKB.P/2019 Tanggal 04 Oktober 2019 Perihal Rekomendasi penelitian, dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut dibawah ini :

Nama : SITI NURHALIZAH
Tempat/Tanggal Lahir : Garing 17 Oktober 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl Mesjid Nurul Qamar III Pa, cinongan

Bermaksud akan mengadakan penelitian/pengumpulan Data diwilayah tempat saudara dalam Rangka Penyusunan Skripsi yang berjudul "**PERANG UNIT PENGELOLAH KEGIATAN (UPK) PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PEDESAAN DALAM PENINGKATAN EKONOMI DI KECAMATAN TOMPOBULU KAB GOWA (DITINJAU DALAM PERSPEKTIF ISLAM)**"

Selama : 07 Oktober s/d November 2019
Pengikuti : Tidak ada

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Camat Tompobulu Cq. Sekretaris Camat Tompobulu
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (Satu) eksemplar copy hasil penelitian kepada Camat Tompobulu Cq. Sekretaris Camat Tompobulu.

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.


 a.n Camat,
 Kas. Pemdes
DARMAN SYAHSE
 Pangkat : Penata
 NIP : 198308242011 01 1008

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Gowa di Sungguminasa (Sebagai laporan)
2. Kapolsek Tompobulu
3. Danramil Tompobulu
4. Dekan Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Makassar
5. Yang bersangkutan
6. Arsip.



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 2145 TAHUN 2019**

TENTANG

**PANITIA DAN TIM PENGUJI KOMPREHENSIF
JURUSAN EKONOMI ISLAM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca** : Surat permohonan Ujian Komprehensif Siti Nurhalizah : NIM: 90100115084
- Merimbang** : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran ujian komprehensif perlu dibentuk Panitia dan Tim Penguji
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;
4. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 25 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama RI No. 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Membentuk Panitia dan Tim Penguji Komprehensif, Jurusan **EKONOMI ISLAM** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar dengan komposisi:
- | | |
|---|--|
| Ketua | : Dr. Muh. Wahyuddin Abdullah, SE., M.Si., Ak. |
| Sekretaris | : Ahmad Efendi, SE., MM. |
| Penguji Bidang Islamiyah | : Siti Aisyah, S.Ag., M.Ag. |
| Penguji Dasar Ekonomi Syariah | : Akramunnas, SE., M.Si. |
| Penguji Keuangan dan Perbankan Syariah | : Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag. |
| Pelaksana | : Roshani |
2. Panitia bertugas melaksanakan ujian
3. Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
4. Panitia dianggap bubar setelah menyelesaikan tugasnya.
5. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN
MAKASSAR

Ditetapkan di : Samata-Gowa
Pada tanggal : 10 Oktober 2019
Kusur Dekan

Mawar : 7812/EB.1/Kp.07/10/2019
Tanda : 09 Oktober 2019



Dr. Muh. Wahyuddin Abdullah, SE., M.Si.
30525 20801 1 017

Tembusan :
1. Rector UIN Alauddin Makassar di Samata-Gowa
2. Para Dekan dalam Lingkup UIN Alauddin Makassar di Makassar
3. Asip

PENYAKSI (FAKHRIUNNISA)	KASUBAG AKADEMIK (NURMIAH MUIN, S.IP.,MM)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Kampus I : Jl. Slt. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864928 Fax 864923
 Kampus II : Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata – Gowa Tlp. 841879 Fax 8221400

Nomor : *Bohe*/EB.1/PP.00.9/11/2019
 Sifat : Penting
 Lamp : -
 Hal : Undangan Seminar Hasil

Samata *of* November 2019

Kepada Yth.
 Bapak/Ibu Penguji dan Pembimbing
 Di:
 Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Seminar Hasil Penelitian Mahasiswa:

Nama : Siti Nurhalizah
 NIM : 90100115054
 Jurusan : EKONOMI ISLAM
 Judul Skripsi : Peran Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan dalam Peningkatan Ekonomi di Kecamatan Tampobulu, Kabupaten Gowa (Ditinjau dalam Perspektif Islam)

Yang insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 11 November 2019
 Waktu : 13.00 - 14.00 WITA
 Tempat : Ruang Seminar

Demikian undangan ini, atas perhatian bapak/ibu diucapkan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 MAKASSAR

Dekan
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
 Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.
 NIP. 19661130 199303 1 003



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 2525 TAHUN 2019**

TENTANG

**PANITIA DAN TIM PENGUJI SEMINAR HASIL PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI MAHASISWA
A.n.SITI Nurhalizah, NIM : 90100115084
JURUSAN EKONOMI ISLAM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca** : Surat Permohonan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar, **SITI Nurhalizah, NIM: 90100115084** untuk melaksanakan seminar hasil.
- Menimbang** : Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran seminar draft/hasil, perlu dibentuk panitia dan tim penguji seminar hasil dan penyusunan skripsi
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;
4. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Alauddin menjadi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
6. Peraturan Menteri Agama RI No. 25 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Agama RI No. 85 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
Pertama**

1. Membentuk Panitia dan Tim Penguji Seminar hasil, Jurusan **EKONOMI ISLAM** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :

Ketua : Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.
Sekretaris : Dr. Hj. Rahmawati Muin, S.Ag., M.Ag.
Pembimbing : Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag.
Pembimbing II : Dra. Hj. Nuraeni Gani, M.M.
Penguji I : Dr. Amiruddin K. M. El.
Penguji II : Muh. Akil Rahman, SE., ME.
Pelaksana : Lenny Martini, S. Ag.

1. Panitia bertugas melaksanakan seminar hasil, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa dan dan kemampuan menguasai masalah penyusunan skripsi
2. Biaya pelaksanaan seminar hasil penelitian dibebankan kepada anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar
3. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kedua

1. Panitia bertugas melaksanakan seminar hasil, memberi bimbingan, petunjuk-petunjuk, perbaikan mengenai materi, metode, bahasa

Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Ditetapkan di: Samata-Gowa
Pada tanggal: 07 November 2019
Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.
NIP. 19661130 199303 1 003

Tembusan :
1. Rektori UIN Alauddin Makassar di Samata-Gowa
2. Para Dekan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Arsip

PEMRAKARS	KASUBAG AKADEMIK



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

ALAUDDIN

Kampus I : Jl. Sh. Alauddin No. 63 Makassar Tlp. (0411) 864928 Fax 864923
Kampus II : J. H. M. Yasin Limpo No. 36 Samata Sungguminasa - Gowa Tlp. 841879 Fax 8221400

Nomor : 6223 /EB.1/PP.00.9/11/2019

Samata, 11 November 2019

Sifat : Penting

Lamp : -

Hal : Undangan Ujian Munaqasyah

Kepada Yth

Bapak/Ibu Penguji dan Pembimbing
D-

Makassar

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, kami mengundang Bapak/Ibu untuk menghadiri Ujian Munaqasyah Mahasiswa:

Nama : Siti Nurhalizah
NIM : 90100115084
Jurusan : EKONOMI ISLAM
Judul Skripsi : "Peran Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan dalam Peningkatan Ekonomi di Kecamatan Toppobulu, Kabupaten Gowa (Ditinjau dalam Perspektif Islam)"

Yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 14 November 2019
Waktu : 13.00 - 15.30 Wita
Tempat : Ruang Seminar

Demikian undangan ini, atas perhatian bapak/ibu diucapkan terima kasih.

Wassalam
Kuasas Dekan

Nomor : 6111/EB.1/Kp.07/11/2019

Tanggal : 11 November 2019



Dr. Muhi. Wahyuddin Abdullah, SE., M.Si., Ak.
NIP. 19730525 200801 1 017

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR : 2694 TAHUN 2019**

TENTANG

**PANITIA DAN TIM PENGUJI MUNAQAQSYAH
JURUSAN EKONOMI ISLAM FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Membaca :** Surat permohonan : Siti Nurhalizah
NIM : 90100115084
Tanggal : 08 November 2019
Mahasiswa Jurusan : EKONOMI ISLAM
Untuk Ujian Skripsi/ Munaqaqsyah yang berjudul "Peran Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan dalam Peningkatan Ekonomi di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa (Ditinjau dalam Perspektif Islam)"
- Menimbang :** 1. Bahwa saudara tersebut diatas telah memenuhi persyaratan Ujian Skripsi/ Munaqaqsyah
2. Bahwa untuk pelaksanaan dan kelancaran ujian/ Munaqaqsyah perlu dibentuk panitia ujian.
- Mengingat :** 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Presiden Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan IAIN Alauddin menjadi UIN Alauddin Makassar;
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Agama;
5. Keputusan Menteri Agama RI No. 5 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Alauddin Makassar;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 93 Tahun 2007 tentang Statuta UIN Alauddin Makassar;
7. Keputusan Menteri Keuangan No.330/05/2008 tentang penetapan UIN Alauddin Makassar pada Departemen Agama sebagai instansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU).
8. Surat Keputusan Rektor UIN Alauddin Nomor 241 B Tahun 2010 Tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** 1. Membentuk Panitia Ujian Skripsi/ Munaqaqsyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar dengan komposisi :
- Ketua : Prof. Dr. H. Abustani Ilyas, M.Ag.
Sekretaris : Dr. Hj. Rahmawati Muin, S.Ag., M.Ag.
Penguji I : Dr. Amiruddin K, M.El.
Penguji II : Muh. Akil Rahman, SE., ME.
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Muslimin Kara, M.Ag.
Pembimbing II : Dra. Hj. Nuraeni Gani, M.M.
Pelaksana : Lenny Martini, S.Ag.
2. Panitia bertugas melaksanakan ujian Skripsi/Munaqaqsyah bagi saudara yang namanya tersebut diatas.
3. Biaya pelaksanaan ujian dibebankan kepada anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.
4. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditandatangani di : Samata-Gowa
Pada tanggal : 12 November 2019
Kuasa Dekan

Nomor : 6111/EB.1/Kp.07/11/2019
Tanggal : 11 November 2019

Dr. Muhs Wahyudin Abdullah, SE., M.St., Ak.
NIP. 19730525 200801 1 017

PEMRAKARSA (FAKHRUNNISA)	KASUBAG AKADEMIK (NURMAH MUIN, S.IP.,MM)
-----------------------------	---

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Siti Nurhalizah biasa dipanggil Liza, lahir di Garing, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 1997, merupakan anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Jabbar dan Ibu Syamsiah. Bertempat tinggal saat ini di Jl. Masjid Nurul Qamar III, Paccinongang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan.

Penulis menyelesaikan jenjang pendidikan di Sekolah Dasar (SD) Inpres Garing pada tahun 2009, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Tompobulu pada tahun 2012, dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Gowa pada tahun 2015. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikannya ke Perguruan Tinggi Negeri Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Jurusan Ekonomi Islam, dan berhasil menyelesaikan pendidikan Strata 1 (satu) pada bulan November tahun 2019.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
 MAKASSAR